

**ANALISIS PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

OLEH:

**ADAM RAHMAN SURADI
G 211 09 005**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

**ANALISIS PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh :

**ADAM RAHMAN SURADI
G 211 09 005**

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Program Studi Agribisnis
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2014

Disetujui Oleh :

Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany
Dosen Pembimbing

Dr. Muh. Hatta Jamil SP, M.Si.
Dosen Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi Agribisnis
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian – Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. SittiBulkis, MS.
NIP. 19610829 198601 2 001

Tanggal Pengesahan : Februari 2014

**PANITIA UJIAN SARJANA
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JUDUL : ANALISIS PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN DI KABUPATEN MAROS PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NAMA MAHASISWA : ADAM RAHMAN SURADI

NOMOR POKOK : G 211 09 005

SUSUNAN TIM PENGUJI

Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany.
Ketua Sidang

Dr. Muh. Hatta Jamil SP. M.Si
Anggota

Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S
Anggota

Dr. Ir. Saadah, M.Si
Anggota

Dr. A. Nixia Tenriawaru.SP., M.Si
Anggota

Tanggal Ujian : Desember 2013

RINGKASAN

ADAM RAHMAN SURADI (G211 09 005) ANALISIS PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAROS. Di Bawah Bimbingan Radi A. Gany dan Muh. Hatta Jamil.

Penelitian ini bertujuan : 1 Menganalisis kesesuaian program penyuluhan pertanian dengan potensi dan keadaan wilayah Kabupaten Maros, 2. Menganalisis implementasi program penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, 3. Menganalisis tingkat partisipasi petani terhadap pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Maros

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. pada bulan Desember 2012 hingga Januari 2013. Penelitian ini menggunakan metode Survei, Penelitian ini mengambil 3 sampel BPP dari 14 populasi yang ada di Kabupaten Maros secara *Purposive Sampling* yaitu Kecamatan Turikale, Cenrana dan Bontoa. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni: 1. Observasi langsung dan wawancara. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yakni: 1. Analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif dan Analisis isi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa program setiap kecamatan yang dijadikan sampel penelitian sesuai dengan potensi dan keadaan wilayah Di Kabupaten Maros, dan untuk implementasi program penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian pada setiap kecamatan termasuk dalam kategori tinggi, dan mengenai tingkat partisipasi petani terhadap pelaksanaan penyuluhan di kabupaten Maros dapat di golongkan pada kategori Tinggi. Adapun strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan partisipasi kelompok tani: 1. BPP lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kegiatan penyuluhan khususnya masyarakat tani yang bermukim di dekat daerah perkotaan. 2 Meningkatkan pembinaan kompetensi dan profesional penyuluh. 3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pertanian, peneliti, perguruan tinggi dan seluruh stakeholder pertanian untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kata Kunci : Program Penyuluhan, Partipasi Kelompok tani, Implementasi Program Penyuluhan oleh Penyuluh Lapangan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ADAM RAHMAN SURADI, lahir di Polewali, pada tanggal 10 April 1990 dan merupakan anak pertama dari pasangan **Drs. Suradi** dan **Hj. Marliah**.

Selama hidupnya, Penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu:

1. TK Pertiwi Sossok, Tahun 1995 - 1997;
2. SD Negeri 33 Sossok, Tahun 1997 - 2003;
3. SMP Negeri 1 Anggeraja, Tahun 2003 - 2006;
4. SMA Negeri 1 Anggeraja, Tahun 2006 - 2009;
5. Lulus melalui Jalur Pemanduan Potensi Belajar (JPPB) menjadi mahasiswa di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2009 untuk Strata Satu (S1).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin penulis aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi dalam lingkup Universitas Hasanuddin sebagai anggota Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA) dan pernah menjadi Badan Pengurus Harian (BPH) MISEKTA sebagai Koordinator Departemen Kerohanian Umum periode 2011/2012 serta aktif mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan tingkat lokal maupun nasional.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin , penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul “ Analisis Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, M.S dan Dr. Muh. Hatta Jamil. SP. M.Si. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal yang bernilai pahala di sisi-Nya, dan semoga apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Februari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin Rasa Syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang karena-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan tanpa rahmat dan hidayah-Nya, tidak mungkin penulis menyelesaikan tulisan ini. Sholawat dan Salam bagi Nabi Muhammad SAW, teladan kolektif bagi umatnya yang telah membawa era baru kejayaan peradaban umat manusia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan yang istimewa dan setinggi-tingginya, rasa cinta penulis serta sembah sujud penulis persembahkan untuk Ayahanda **Drs. Suradi** dan Ibunda **Hj. Marliah** , yang penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau yang telah membesarkan, mendidik, memberikan arahan, bantuan, motivasi dengan penuh kasih sayang serta masukkan dalam penyelesaian skripsi ini, kesabaran, ketulusan dan keikhlasan serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk anaknya selama ini (*Semoga tulisan ini dapat menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Ibu*). Adik-adikku tersayang, **Ika Nurfaidah, Ari Fuddin Nur**. Terima kasih atas segala perhatian, doa, dukungan, dan canda tawanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang peneliti temui mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian akhir skripsi ini. Namun, *Alhamdulillah* berkat usaha dan kerja keras serta bimbingan, arahan, kerjasama, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS.** selaku Ketua Jurusan dan **Ir. A. Amrullah Majjika, M.Si.** selaku Sekertaris Jurusan Sosial ekonomi Pertanian periode 2010-2014.
2. **Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany** dan **Dr. Muh. Hatta Jamil, SP. M.Si.,** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S** dan **Dr. Ir. Saadah, M.Si.,** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan demi penyempurnaan skripsi ini.
4. **Dr. A. Nixia Tenriawaru, SP. M,Si,** selaku Panitia Ujian dan **Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si** selaku Panitia Seminar yang telah menyempatkan waktu menyimak dan memberikan kritik dan saran dalam skripsi ini.
5. **Kepada Seluruh Dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian** yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan serta seluruh staf Pegawai dan Administrasi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

6. **Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Khususnya angkatan 2009 (MIZONE)** yang telah berbagi suka dan duka sejak penulis menuntut ilmu di kampus ini. terima kasih atas arahan, bantuan, semangat dan doanya serta kebersamaan selama ini, semoga selalu terjalin rasa persaudaraan diantara kita untuk ke depannya. Terima kasih mas bro Suko, furqan, abeng, wawan, fuad, ade, rusli, andi, iccang, rion, rifky, agus, jemi, amrul SP, kadek, dan juga untuk perempuannya Dila SP, Audiyah SP, Ari SP, Amma. Sri, Dita, Teteh, Mala, Kumala, Firta SP, Nana SP, anty u, ketbel (hardiyanti sultan SP), Abii SP, Dina SP, Ridha SP, Amma, Dian SP, Silvia, Irda SP, Fatma M SP, Ikki SP, Athirah SP, Cchi, Dini, Lia, Fani dan semua rekan-rekan MIZONE yang telah berbagi suka dan duka sejak penulis menuntut ilmu di kampus ini . I ♥ YOU ALL .
7. **Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian** untuk kanda-kanda angkatan 2005, 2006, 2007 dan 2008 yang telah memberikan dukungannya selama saya menjalani masa-masa perkuliahan : Kak Ewin, Kak Arul SP, Kak Kemal SP, Kak Awal SP, Kak Cute, Kak Uccang, Kak Rauf SP. Kak Aswin SP, Kak Adi SP, Kak Ade, Kak Firman SP, Kak Opi SP, Kak Smith SP,
8. **Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian** untuk dinda-dinda angkatan 2011 dan 2012 yang telah membantu saya Enal(cupu), Madi, Occi, Irwan (ketum Misekta), Yudis, Puyol, Zul (Mas Joko), Aif, Iccang, Ulla, Tio, Ai, Wandu (Sekum Misekta), Vico, Kevin, Aris (janggal) Ical dan Tari (Cempren), Vivi, Eka (Elon), Nengsih, Novi, Lulu,

Nani, Iis, Rabiatul Adawiah (Ibu), Unna, Mega, Arti, Jean, Revy, Ima, dll, serta untuk angkatan 2012 teruma buat Ira, Rendy, Warlin, Mingha, Ummi, Trisno.

9. **Teman-teman KKN Reguler Gelombang 82 di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang** Ibenk, Dio, dll serta, Ibu Posko tempat kami tinggal selama 2 bulan yang telah bersedia menerima dan membantu kami selama KKN .
10. **Keluarga Besarku di Enrekang dan Polewali** yang selalu mendo'akan saya dalam menempuh pendidikan selama ini.
11. Terkhusus untuk teman angkatan saya **FATMAWATI RAMLI SP**, yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan doanya untuk menyelesaikan tugas akhir saya, Thanks you Dear.
12. **Dan kepada semua pihak** yang telah memberi bantuan yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Teriring doa penulis panjatkan kepada Allah SWT kiranya semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam bentuk apapun, dilimpahkan anugerah, berkat, rahmat dan ridho-Nya, Amin.

Makassar, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN TIM PENGUJI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	7
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penyuluhan Pertanian.....	9
2.1.1 Pengertian Penyuluhan	9
2.1.2 Prinsip-Prinsip Penyuluhan.....	14
2.1.3 Falsafah Penyuluhan.....	17
2.2 Programa Penyuluhan.....	21
2.3 Partisipasi.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran.....	26
2.5 Hipotesis.....	28
BAB. III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.2 Penentuan Responden.....	29

3.4 Pengumpulan Data.....	30
3.5 Analisis Data.....	32
3.6 Konsep Operasional.....	34
BAB. IV KEADAAN UMUM LOKASI	
4.1 Letak Geografis dan Letak Administratif.....	36
4.2 Keadaan Iklim dan Topografi.....	38
4.3 Keadaan Penduduk.....	39
4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	39
4.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	40
4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	41
4.4.1 Sarana Pendidikan.....	41
4.4.2 Kesehatan.....	42
4.4.3 Perdagangan.....	43
4.5 Potensi Pertanian.....	44
4.5.1 Tanaman Pangan.....	44
4.5.2 Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	45
4.5.3 Peternakan dan Perikanan.....	45
4.6 Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Cenrana.....	46
4.7 Keadaan Umum Wilayah KecamatanTurikale.....	47
4.8 Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Bontoa.....	48
BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Karakteristik Responden.....	50
5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	50
5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan pendidikan..	51
5.1 Potensi dan keadaan wilayah penelitian.....	53
5.1.1 Kecamatan Bontoa.....	53
5.1.2 Kecamatan Cenrana.....	58
5.1.3 Kecamatan Turikale.....	64
5.2 Implementasi Programa Penyuluhan Oleh penyuluh Lapangan Kabupaten Maros.....	71

5.2.1 Kecamatan Bontoa.....	72
5.2.2 Kecamatan Cenrana.....	74
5.2.3 Kecamatan Turikale.....	75
5.3 Tingkat Partisipasi dalam kegiatan Penyuluhan.....	77
5.3.1. Tingkat Partisipasi Dalam Kegiatan Penyuluhan...	77
5.3.2. Tingkat Frekuensi Petani Memberikan Saran dan Tanggapan dalam kegiatan Penyuluhan.....	80
BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Teks	Hal
1.	Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, Lingkungan Dan Dusun Di Kabupaten Maros, 2012.....	37
2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di kabupaten Maros, 2012.....	39
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Maros, 2012.....	40
4.	Jumlah Lembaga Pendidikan Di kabupaten Maros, 2012.....	41
5.	Jumlah Sarana Kesehatan Di kabupaten Maros, 2012.....	42
6.	Jumlah Sarana Kegiatan Perdagangan /Perekonomian Di Kabupaten Maros, 2012.....	43
7.	Jumlah Responden Berdasarkan Umur, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	51
8.	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	52
9.	Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencariannya Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	53
10	Pemanfaatan Lahan Pertanian Kecamatan Bontoa, 2012.....	52
11	Potensi Sumberdaya Perikanan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	54
12	Potensi Sumberdaya Perikanan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	56
13	Pemanfaatan Lahan Pertanian Kecamatan Bontoa, 2012.....	58
14	Penggunaan Lahan Pertanian Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012	59
15	Jumlah Ternak dan Unggas Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	60
16	Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	61
17	Luas Tanam, Panen dan Produktifitas Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	64
18	Pemanfaatan Lahan Pertanian Kecamatan Turikale, 2012.....	65
19	Keadaan Luas Tanam Padi/Produksi di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	65
20	Keadaan Luas Tanam Kacang Ijo/Produksi Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	66
21	Keadaan Luas Tanam Jagung/Produksi Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	66
22	Keadaan Luas Tanam Ubi kayu/Produksi Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	67
23	Luas Lahan menurut Penggunaannya pada Bidang Perikanan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	68

No	Teks	Hal
24.	Luas Lahan menurut penggunaannya Bidang Peternakan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.....	69
25.	Tingkat Implementasi Programa Penyuluhan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	72
26.	Tingkat Implementasi Programa Penyuluhan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	74
27.	Tingkat Implementasi Programa Penyuluhan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	75
28.	Tingkat Partisipasi Petani Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	77
29.	Tingkat Partisipasi Petani Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	78
30.	Tingkat Partisipasi Petani Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	79
31.	Frekuensi Petani Memberikan Saran dan Tanggapan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	80
32.	Frekuensi Petani Memberikan Saran dan Tanggapan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	80
	Frekuensi Petani Memberikan Saran dan Tanggapan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.....	81

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal
1.	Kerangka Pemikiran.....	28
2.	Peta Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.....	37
.		
.		

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke 21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun demikian, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan melalui penyuluhan pertanian.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian karena dalam kegiatan penyuluhan pertanian melakukan pembinaan, (meningkatkan dan mengembangkan wawasan petani), memberikan motivasi kepada petani. Sebagai contoh pembangunan pertanian yakni melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan pertanian dapat menghantarkan Bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat antar instansi terkait tapi masih dengan menggunakan pendekatan dari atas yang dimodifikasi. Dengan cara ini penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masa Bimas sudah mulai terintegrasi dengan baik.

Namun, keberhasilan penyuluhan pertanian melalui program BIMAS menimbulkan anggapan bahwa penyuluhan pertanian yang dilaksanakan saat dilakukan dengan pendekatan *dipaksa, terpaksa dan biasa*. Petani dipaksa untuk menerima teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya, dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya, walaupun pada akhirnya petani meningkat kemampuannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi yang diusahakan sehingga Indonesia mencapai swasembada beras.

Kegiatan penyuluhan pertanian selama ini secara konseptual bermakna sebagai pedoman yang dilakukan oleh penyuluh dalam melaksanakan program kerja penyuluh. Secara konseptual kegiatan

penyuluhan pertanian pada masa orde lama mengutamakan motivasi dapat dilihat dari tujuan diadakannya program BIMAS (Bimbingan masyarakat) ini untuk peningkatan produksi

Dalam era reformasi dan otonomi sekarang ini, pendekatan dari atas tentunya sudah tidak relevan lagi, karena yang kita inginkan adalah bahwa petani dan keluarganya mengelola usahataniya dengan penuh kesadaran, bukan terpaksa, mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada, yang ditawarkan penyuluh pertanian dan pihak-pihak lain. Dengan pilihannya itu, petani yakin bahwa dia akan dapat mengelola usahataniya dengan produktif, efisien dan menguntungkan serta berdaya saing tinggi.

Dari pengalaman-pengalaman di atas, kedepan penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus sesuai dengan aspirasi, harapan, kebutuhan, dan potensi serta peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya. Oleh karena itu penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan didasari pada prinsip-prinsip pemberdayaan dan dikembangkan mengacu pada Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang Programa Penyuluhan Undang-undang tersebut, urusan pertanian termasuk penyuluhan pertanian merupakan urusan pilihan, tetapi walaupun begitu mengingat pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan umumnya juga merupakan tulang punggung ekonomi sebagian besar daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maka seyogyanya Provinsi dan Kabupaten/Kota

menetapkan urusan pertanian menjadi urusan pertama yang akan dikembangkan di wilayahnya, seperti yang dilakukan oleh pusat yang telah menetapkan pertanian sebagai sektor yang strategis dalam mengembangkan ekonomi Indonesia dengan melakukan revitalisasi pertanian.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat Desa. dalam satu sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kenyataannya sekarang, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun harus jelas keserasian hubungan antar susunan program tersebut dalam penyelenggaraannya.

Para penyelenggara penyuluhan pertanian melakukannya dengan persepsi, pendekatan dan sistem yang berbeda-beda, tidak terintegrasi karena tidak berdasarkan pada filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan yang sama. Hal demikian menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak efisien dan efektif, sehingga tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akhirnya penyelenggaraan penyuluhan

pertanian tidak dapat memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pembangunan pertanian baik secara nasional maupun secara lokalita.

Disamping itu, penyebab tidak terintegrasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara lain adalah karena produk-produk hukum lingkup pertanian dalam arti luas belum memberikan kejelasan tentang penyuluhan pertanian. Siapa yang melakukan penyuluhan pertanian, apa yang dimaksud penyuluhan pertanian, dimana melakukan penyuluhan pertanian, bilamana dilakukan penyuluhan pertanian, dan bagaimana melakukan penyuluhan pertanian belum diatur secara jelas sebagai suatu sistem yang terintegrasi.

Dalam penyelenggaraan penyuluhan tidak terlepas dari rencana program kerja penyuluh yang di buat oleh penyuluh yang disebut programa penyuluhan. Tujuan Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu wujud perencanaan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari definisi programa penyuluhan pertanian Tingkat Desa yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Programa Penyuluh terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan, atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan propinsi dan programa penyuluhan nasional.

Programa Penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan merupakan rencana yang disusun secara sistematik memuat tentang penjabaran aspirasi kebutuhan petani di Desa Koto Lanang dan program pemerintah kecamatan Depati Tujuh guna memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali tercapainya tujuan penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing – masing tingkatan dan cakupan pengorganisasian pengelolaan sumberdaya yang ada sebagai pelaksana penyuluhan (Sito, 2011).

Inti program adalah rancangan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan petani serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi dari program ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja penyuluhan pertanian selama satu tahun (Sito, 2011).

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai program penyuluhan dengan judul “ Analisis Dokumen Program Penyuluh pertanian” Studi kasus di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Apakah Programa Penyuluhan yang dibuat penyuluh sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Maros?
- b. Apakah implementasi program kerja penyuluh sesuai dengan programa penyuluhan pertanian di kabupaten Maros ?
- c. Bagaimna tingkat partisipasi petani terhadap pelaksanaan penyuluhan Di kabupaten Maros ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Menganalisis kesesuaian programa penyuluhan pertanian dengan potensi dan keadaan wilayah Kabupaten Maros
- b. Menganalisis implementasi programa penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian
- c. Menganalisis tingkat partisipasi petani terhadap pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Maros

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka manfaat penelitian yang ingin di capai adalah:

- Sebagai bahan pertimbangan kepada balai penyuluh dalam merancang program kerja (programa penyuluhan)
- Sebagai bahan informasi kepada balai penyuluh mengenai hal-hal yang diinginkan oleh petani dalam meningkatkan pengetahuan bertani
- Bahan acuan penelitian kedepan yang berkaitan dengan Penyuluhan Pertanian
- Bagi petani dan dan penyuluh yang terlibat sebagai bahan informasi untuk melaksanakan kerjasama
- Bagi peneliti sebagai penerapan ilmu atau teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan dapat diterapkan dalam permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan dapat memberikan alternative pemecahan masalah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyuluhan Pertanian

2.1.1 Pengertian Penyuluhan

Penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata "*Extension*" yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. *Extension* itu sendiri, dalam bahasa aslinya dapat diartikan sebagai perluasan atau penyebarluasan. Proses penyebarluasan yang dimaksud adalah proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha demi tercapainya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan pertanian. (Mardikanto, 1993)

Pengertian tentang Penyuluhan Pertanian memang sangat sulit dirumuskan karena menyangkut banyak tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu, setiap orang dapat memberikan konsepnya sendiri sesuai dengan latar belakang keilmuan dan kepentingan yang ada padanya.

1. Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Penyebarluasan Informasi

Penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha demi tercapainya peningkatan produktivitas dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan pertanian.

Penyebaran informasi ditinjau dari isi materinya dapat mencakup:

- (1) Ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi upaya peningkatan jumlah dan perbaikan mutu produksi.
- (2) Analisis ekonomi yang berkaitan dengan upaya memperoleh pendapatan dan atau keuntungan dari kegiatan usahatani.
- (3) Ragam kelembagaan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan produksi dan pendapatan atau keuntungan usahatani.
- (4) Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melakukan rekayasa social demi tercapainya tujuan peningkatan produksi dan pendapatan/keuntungan yang diinginkan.
- (5) Peraturan dan kebijakan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan upaya peningkatan produksi dan pendapatan/keuntungan usahatani.

Menurut sumber dan alur informasinya, Lionberger dan Gwin (1983) membagi informasi dalam :

- (1) Informasi tentang hasil-hasil temuan yang dihasilkan oleh para peneliti (melalui para penyuluh) kepada masyarakat penggunanya.
- (2) Umpan-balik dari penerapan hasil penelitian yang disampaikan masyarakat pengguna kepada peneliti.

2. Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Penerangan

Penyuluh pertanian sebagai proses penerangan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat (petani) tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas untuk

dilaksanakan/diterapkan dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan/keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan pertanian.

3. Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Perubahan Perilaku

Penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) di kalangan masyarakat (petani), agar mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam usahatani demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan pertanian.

4. Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Pendidikan

Tujuan penyuluhan pertanian adalah untuk mewujudkan terjadinya perubahan perilaku. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian sering diartikan sebagai suatu sistem pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakatnya.

5. Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Rekayasa Sosial

Penyuluhan Pertanian Sebagai Proses Rekayasa Sosial dapat diartikan sebagai proses rekayasa sosial untuk terciptanya perubahan perilaku anggota-anggotanya, seperti yang dikehendaki demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga petani dan masyarakat.

.Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (UU Tentang Sistem Penyuluhan PPK, 2006).

Penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik dalam bidang ekonomi, social, maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Penyuluhan pertanian adalah sistim pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pemberdayaan yang bertujuan agar para petani dan keluarganya mampu secara mandiri mengorganisasikan dirinya dan masyarakat untuk bisa hidup lebih sejahtera. Petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan kesejahteraan yang lebih baik secara berkelanjutan (Uki stia Rahayu, 2012).

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada zaman Hindia Belanda menggunakan pendekatan atas perintah atau pendekatan dari atas (*top down*). Pemerintahan pendudukan Jepang masih

menggunakan pendekatan dari atas, bahkan setelah kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih juga menggunakan pendekatan dari atas, walaupun dalam perkembangannya kemudian mengalami berbagai modifikasi.

Penyuluhan merupakan subsistem dari pembangunan pertanian, dimana perannya menjadi penting karena mengupayakan terjadinya alih teknologi pertanian dalam kalangan masyarakat petani yang menjadi perangkat pokok pembangunan pertanian, sehingga dapat memperluas dan memodernisasi sektor pertanian agar mampu memberikan hasil yang lebih baik.

Mardikanto (1999) menyatakan bahwa merujuk pada pemahaman penyuluhan pertanian sebagai proses pembelajaran, maka prinsip-prinsip dalam penyuluhan pertanian sebagai berikut:

1. Mengerjakan; artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan sesuatu.
2. Akibat; artinya kegiatan pertanian harus memberikan dampak yang memberipengaruh baik.
3. Asosiasi; artinya kegiatan penyuluhan harus saling terkait dengan kegiatanlainnya. Misalnya apabila seorang petani berjalan di sawahnya kemudianmelihat tanaman padinya terserang hama, maka ia akan berupaya untukmelakukan tindakan pengendalian.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Penyuluhan

Prinsip penyuluhan merupakan landasan operasional bagi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan sebagai acuan bagi seorang penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip:

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu.
- b. Akibat, artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- c. Asosiasi, artinya setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya.

Dahama dan Bhatnagar (1980) lebih lanjut mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang mencakup :

1. Minat dan Kebutuhan, artinya penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
3. Keragaman budaya, artinya penyuluhan harus memperhatikan adanya keragaman budaya setiap wilayah yang berbeda.

4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar sertiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
8. Penggunaan metode penyuluhan yang sesuai dengan lingkungan.
9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasan sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
11. Segenap keluarga, artinya penyuluhan harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
12. Kepuasan, artinya penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

Departemen Pertanian, secara spesifik mengenalkan prinsip-prinsip kerja penyuluhan sebagai berikut :

- Penyuluhan pertanian diselenggarakan pada kondisi yang nyata, artinya sesuatu yang disampaikan kepada petani harus diyakini kebenarannya, melalui kegiatan penelitian atau uji coba teknologi;
- Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, harus ada kerjasama yang serasi antara pihak peneliti, penyuluh dan petani;
- Penyuluhan pertanian harus bersifat demokratis, artinya sesuatu yang hendak disampaikan kepada petani harus jauh dari sifat paksaan;
- Perencanaan kegiatan pertanian harus dilakukan secara bersama “joint planning” dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dengan pembangunan pertanian
- Evaluasi keberhasilan penyuluhan harus didasarkan atas perubahan yang terjadi pada diri petani sebagai sasaran penyuluhan.

Mardikanto (2006) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam metode penyuluhan pertanian, meliputi:

1. Upaya Pengembangan untuk berpikir kreatif:Prinsip ini dimaksudkan bahwa melalui penyuluhan pertanian harus mampumenghasilkan petani-petani yang mandiri, mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap

potensi dan peluang yang diketahui untuk memperbaiki mutu hidupnya.

2. Tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan sasaran. Prinsip ini akan mendorong petani belajar pada situasi nyata sesuai permasalahan yang dihadapi.
3. Setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya:Prinsip ini mengingatkan kepada penyuluh bahwa keputusan-keputusan yangdiambil petani dilakukan berdasarkan lingkungan sosialnya.
4. Ciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran. Keakraban hubungan antara penyuluh dan sasaran memungkinkan terciptanya keterbukaan sasaran dalam mengemukakan masalahnya.
5. Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan.

2.1.3 Falsafah Penyuluhan

Berdasarkan falsafah penyuluhan saat ini yang berorientasi pada kesejahteraan petani, maka peningkatan pada aspek produksi saja belum menjamin terwujudnya hal tersebut. Untuk menjawab tantangan bidang penyuluhan seperti itu, maka reorientasi dari kelembagaan lain yang erat kaitannya dengan penyuluhan perlu dipikirkan

Falsafah penyuluhan pertanian diantaranya adalah: *Pertama*, Belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif; apa yang dikerjakan atau dialami sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani atau nelayan

dan menjadi kebiasaan baru. *Kedua*, Belajar melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praktis; kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dan menjadikan petani seseorang yang berprakarsa dan berswadaya. *Ketiga*, Berperanan dalam kegiatan-kegiatan menimbulkan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri, program pertanian untuk petani atau nelayan dan oleh petani atau nelayan akan menimbulkan partisipasi masyarakat tani atau nelayan yang wajar (Paulian, 1987).

Mudjino (1989) mengingatkan untuk mengaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealism, realism, dan pragmatism. Artinya, penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis. Di samping itu, penyuluhan pertanian harus selalu mengacu pada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapang atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.

Lebih lanjut Margono Slamet (1989) menekankan perlunya falsafah penyuluhan yang harus berakar pada falsafah negara Pancasila, terutama yang berkaitan dengan sila-sila: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jika petani (sebagai sasaran utama penyuluhan pertanian) diminta untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan produksinya.

Salah satu falsafah pendidikan/penyuluhan yang banyak digunakan di Indonesia, yakni falsafah pendidikan “taman siswa” yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro, yakni :

- Ing ngarso sun tulodo, artinya apabila pendidik atau penyuluh berada di depan, maka senantiasa memberi teladan;
- Ing madya mangun karso, artinya apabila pendidik atau penyuluh berada ditengah-tengah anak didik atau petani maka senantiasa harus membangkitkan semangat anak didiknya;
- Tut wury handayani, artinya apabila pendidik atau penyuluh berada dibelakang anak didik atau petani, maka harus mampu mendorong agar lebih maju atau meraih keberhasilan.

Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Arahnya adalah terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri (dapat mengambil keputusan yang terbaik) bagi kesejahteraannya.

Deptan (2002) mendefinisikan penyuluhan pertanian sebagai pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar

mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai (Slamet, 2001).

Penyuluhan pertanian sebagai proses pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “better farming, better business, dan better living”, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengadopsi teknik produksi dan pemasaran demi meningkatkan pendapatannya. Di samping itu, melalui penyuluhan, masyarakat difasilitasi agar memiliki posisi tawar yang semakin membaik dalam pengambilan keputusan dan konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat lapisan bawah lainnya (Mardikanto, 2009).

Samsudin (1994), Dalam kegiatan penyuluhan terdapat berbagai Peranan penyuluhan menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut:

1. Menyebarkan ilmu dan teknologi pertanian,
2. Membantu petani dalam berbagai kegiatan usahatani,
3. Membantu dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani,
4. Membantu petani untuk menambah kesejahteraan keluarganya,
5. Mengusahakan suatu perangsang agar petani lebih aktif,
6. Menjaga dan mengusahakan iklim sosial yang harmonis, agar petani dapat dengan aman menjalankan kegiatan usahatani,

7. Mengumpulkan masalah-masalah dalam masyarakat tani untuk bahan penyusunan program penyuluhan pertanian.

(Uki stia Rahayu, 2012), Selain peranan penyuluhan juga terdapat fungsi–fungsi penyuluhan dilakukan, adapun fungsi penyuluhan yakni sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada petani tentang pengetahuan dan perkembangan pertanian,
2. Membantu petani memperoleh pengetahuan yang lebih terperinci tentang cara memecahkan masalah-masalah penelitian,
3. Meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihan yang dianggap paling tepat
4. Membantu petani menganalisis situasi yang sedang dihadapi dalam melakukan pemikiran kedepan.

2.2. Programa Penyuluhan

Mengawali akan pengertian Programa Penyuluhan Pertanian dalam Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.56 Tahun 1996 dan No.301/Kpts/LP.120/4/96. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; disebutkan bahwa

“...Programa Penyuluhan adalah Rencana tentang kegiatan Penyuluhan Pertanian yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin

dicapai, masalah-masalah alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun...” (Anonim, 2011).

Programa Penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dan perikanan merupakan rencana yang disusun secara sistematis memuat tentang penjabaran aspirasi kebutuhan petani di Desa dan program pemerintah kecamatan guna memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali tercapainya tujuan penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing – masing tingkatan dan cakupan pengorganisasian pengelolaan sumberdaya yang ada sebagai pelaksana penyuluhan (Lasantha, 2011).

Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan perikanan dan Kehutanan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan sehingga menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokasi yang strategis dan mempunyai daya yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah dan pendapatan petani sekaligus sebagai bahan informasi untuk dinas yang terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan. Program adalah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk dan sistematika yang teratur. Program dapat dihasilkan melalui proses

perencanaan program yang diorganisasikan secara sadar dan terus menerus, untuk memilih alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan (Suparta,2003).

Rencana kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat secara lengkap tentang apa, mengapa, bagaimana, siapa, bilamana, dimana, dan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Rencana kerja merupakan bentuk kegiatan yang disusun sedemikian rupa (dalam bentuk tabel) sehingga lebih mudah dapat dipahami serta dapat memberikan dasar pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan secara efisien, sebab didalam rencana kerja dirumuskan secara jelas mengenai masalah umum, masalah khusus, tujuan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan orang yang akan melaksanakan kegiatan, sasaran kegiatan yang akan dilakukan, dan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan, serta rencana evaluasi yang selanjutnya disusun dalam bentuk rencana kerja (Suparta, 2002).

Untuk Penyusunan program kerja penyuluhan perlu memperhatikan filosofi program penyuluhan yakni sebagai berikut:

- a. Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan.
- b. Bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin bebas dari penderitaan kemiskinan.
- c. Harus dianggap, bahwa masyarakat ingin kebebasan dalam menentukan hidup dan memutuskan bentuk-bentuk ekonomi.

- d. Nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya.
 - e. Membantu dirinya sendiri.
 - f. Masyarakat adalah sumber terbesar.
 - g. Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir.
- (Anonim, 2011).

2.3. Partisipasi

Kesulitan dalam penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat menurut Mardikanto (2009) disebabkan karena beberapa hal yaitu,: Pengembangan partisipasi akan menghilangkan hak-hak keistimewaan atau perbedaan status sosial yang biasanya dimiliki oleh kelompok “elite” tertentu di daerah. Disamping itu juga persepsi yang menilai masyarakat sulit diajak maju. Padahal itu menurut White (1978) dalam Mardikanto (2009) menunjukkan tidak memahami karakteristik masyarakat. Pada sisi kesulitan dalam penumbuhan partisipasi tersebut disebabkan karena terlalu lama direkayasa untuk tidak terlalu berpikir oleh pihak penguasa. Sehingga mereka suka menerima apapun yang harus dilakukan, dibandingkan harus ikut susah-susah berpikir merencanakan. Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.

Menurut Slamet, M (1985) tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 unsur pokok yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Partisipatif adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya (implementasi) program dan proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006).

Pengetian partisipasi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keikutsertaan, turut serta dalam kegiatan. Sedangkan menurut Bornby (1974), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan yang dimaksud untuk memperoleh manfaat (Webster, 1976). Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969).

2.4. Kerangka Pemikiran

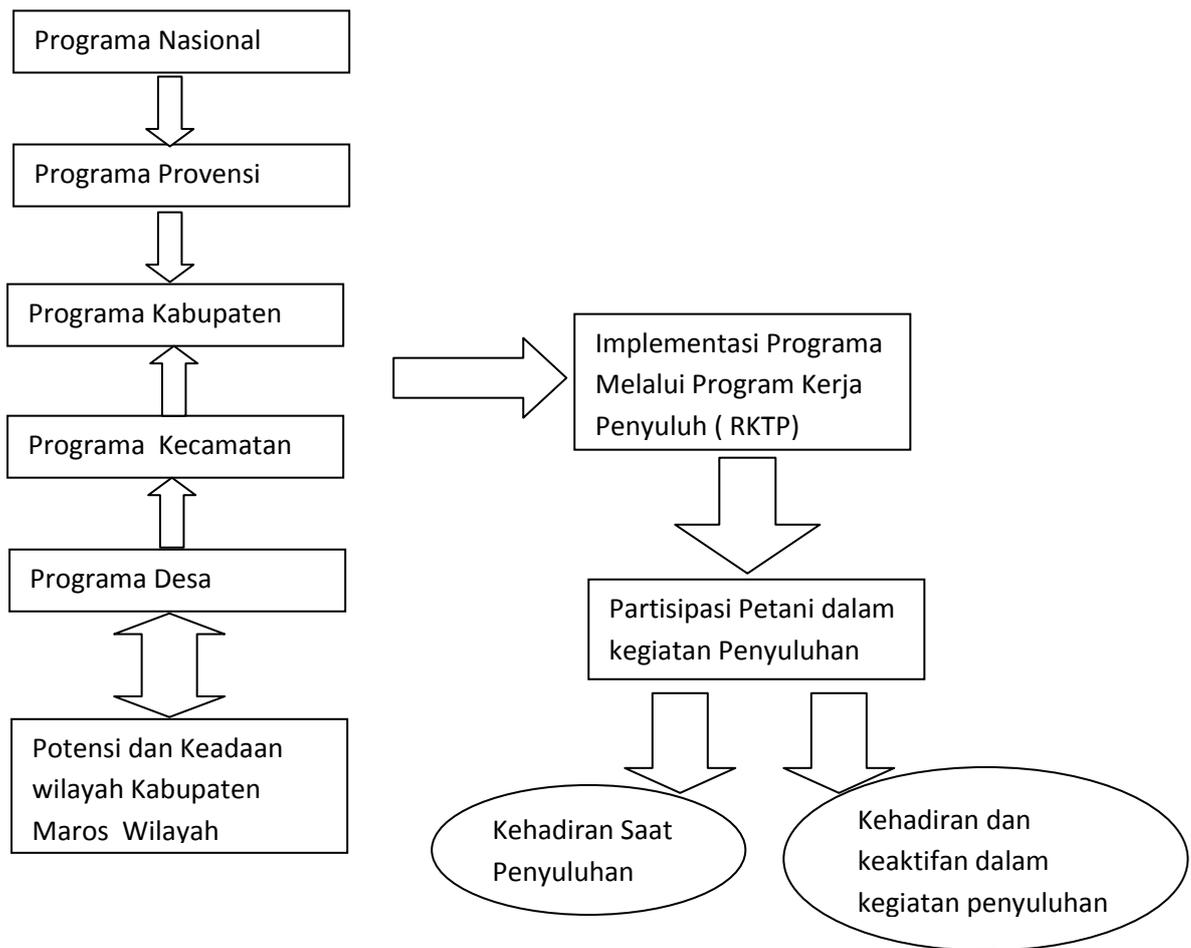
UU SP3K nomor 16 tahun 2006, mengamanatkan tentang sistem penyusunan program penyuluhan yang sejalan dan terpadu mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Oleh karena itu pembentukan lembaga penyuluhan merupakan salah satu upaya dalam rangka koordinasi terpadu pelaksanaan penyuluhan di Indonesia.

Penyusunan program dari tingkat desa, pada dasarnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan partisipatif dari pelaku utama yakni petani serta didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan. Harapannya bisa diperoleh dokumen perencanaan penyuluhan atau program penyuluhan desa yang berbasis pada kondisi alam daerah, potensi yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaku utama atau pelaku usaha yang ada di desa tersebut. Dokumen program penyuluhan desa menjadi dasar dalam penyusunan program penyuluhan di tingkat kecamatan dan diharapkan pula menjadi dasar dalam rencana pembangunan tingkat desa.

Penyusunan program penyuluhan di tingkat kabupaten selain harus mengacu pada kebijakan program penyuluhan tingkat propinsi sesuai dengan amanat UU SP3K no. 16 tahun 2006, juga mengacu pada program penyuluhan tingkat kecamatan. Dokumen program penyuluhan tingkat kabupaten akan menjadi bahan untuk menyusun rencana pembangunan sektor pertanian.

Oleh karena itu, perlu dilihat kaitan program penyuluhan kabupaten dengan rencana kerja sektor pertanian, yaitu BPPKP, Dinas Pertanian Tanaman Pangan pekebunan dan kehutanan dan Dinas Peternakan Perikanan.

Program penyuluhan yang telah disahkan pada masing-masing tingkat wilayah, menjadi dasar bagi penyuluh untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan dalam satu tahun ke deppan yang disebut rencana kerja tahunan penyuluh (RKTP). RKTP yang disusun oleh penyuluh setiap bulannya dijabarkan menjadi rencana kerja harian penyuluh dan untuk selanjutnya pelaksanaan tugas penyuluh secara teknis akan dilakukan dengan berpedoman pada rencana kerja harian tersebut. Siklus yang berlangsung setiap tahun dalam penyusunan program penyuluhan mulai tingkat desa sampai pusat yang terintegrasi dengan sektor pembagunan wilayah, merupakan satu solusi untuk mencapai tujuan akhir.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Operasional Penelitian

2.5. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan tujuan penelitian dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Program penyuluhan setiap Kecamatan di Kabupaten Maros dapat digolongkan sesuai dengan potensi dan keadaan wilayah di kecamatan yang ada Kabupaten Maros.
2. Implementasi program kerja penyuluh sesuai dengan program penyuluhan kecamatan di Kabupaten Maros
3. Partisipasi petani terhadap pelaksanaan program tergolong tinggi

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Cenrana, Turikale dan Bontoa Kabupaten Maros yang berlangsung selama 2 bulan yaitu bulan Januari sampai Februari 2013, dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut telah mewakili 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Kecamatan Turikale daratan rendah, Kecamatan Cenrana mewakili daratan tinggi dan kecamatan bontoa mewakili daerah pesisir.

3.2 Penentuan responden

Penentuan responden secara *Purposive Sampling* dilakukan bagi penyuluh yakni kordinator BPP, Tata Usaha BPP, serta Penyuluh Lapangan dan secara acak bagi petani, dimana bagi petani yakni untuk mengukur bagaimana tingkat partisipasi petani terhadap Program kerja Penyuluh yang disesuaikan oleh Program Kecamatan tersebut. Dari 3 kecamatan yang ada di kecamatan maros jumlah populasi kelompok tani yang ada sebanyak 172 kelompok dengan jumlah anggota setiap kelompok tani antara 20 sampai 25 orang.

Adapun menurut (Arikunto, 2005) apabila subjek kurang dari 100 orang lebih baik populasi di ambil semua sebagai sampel, tetapi apabila lebih dari 100 atau besar maka dapat di ambil 10-15 % atau 20-25 % atau Lebih. Berdasarkan uraian tersebut maka jumlah sampel yang dipilih sebesar 10 % dari jumlah populasi

3.3 Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Ada 2 pengumpulan data yakni:

1. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus di cari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden. Yaitu orang yang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Untuk mengumpulkan data primer diperlukan metode dan instrumen tertentu.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan yang di publikasikan).

3. Observasi Langsung Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang perilaku sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.
4. Wawancara dilakukan secara langsung, muka dengan muka antara pewawancara dengan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pewawancara sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang bersangkutan tinggal memperikan beberapa pertanyaan secara tertulis sehingga pada saat melakukan wawancara sehingga pada saat melakukan wawancara yang bersangkutan tinggal membacakan dihadapan responden

3.4 Analisis data

Analisis deskripsi kualitatif-kuantitatif suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.. untuk menganalisis data program penyuluhan.

Analisis deskriptif kualitatif akan memberikan informasi secara visual dan bersifat subyektif dalam menganalisisnya. Melalui analisis deskriptif kualitatif diuraikan dan digambarkan dengan tabel, antara lain yaitu karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pemilikan lahan, penguasaan lahan, luas tanam kakao, luas panen kakao, dan produktivitas kakao. Analisis deskriptif kualitatif dipergunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara proses pelaksanaan, hasil, dan dampak program kerja penyuluh pertanian. Untuk mengevaluasi kesesuaian tersebut dapat diukur menggunakan skala jenjang 3 (1, 2, dan 3). Untuk pernyataan positif respon sangat baik diberi skor 3, sedangkan respon tidak sesuai dan kurang sesuai diberi skor 1 dan 2. Total skor jawaban

tersebut dikonversi untuk mengetahui kesesuaian antara Program kerja Penyuluh pertanian dengan proses pelaksanaan, hasil, dan dampak keberhasilan program kerja penyuluh pertanian dengan lima kategori, yaitu sangat sesuai, sesuai, sedang, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai.

Pemberian skor terhadap pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Skor 1 diberikan apabila jawaban, Tidak sesuai
- b. Skor 2 diberikan apabila jawaban kurang sesuai
- c. Skor 3 diberikan apabila jawaban sesuai

Proses selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif berupa pembobotan yang bertujuan memaknai (mengartikan) tingkat kepentingan (degree of important) dari masing-masing pertanyaan. Kemudian dibuat scoring dengan menggunakan skala tingkat (rating scale) menurut skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2010).

Berdasarkan penggolongan ketiga kategori di atas, yang menjadi masalah adalah nilai relatif yang termasuk pada masing-masing kategori. Dalam hal ini dapat digunakan rumus untuk mendukung interval kelas yakni sebagai berikut :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Range}}{\text{Jumlah Kelas}} + 1$$

Keterangan :

Range = Nilai tertinggi – Nilai Terendah

Hasil pencapaian skor diinterpretasikan pada variabel proses pelaksanaan, hasil, dan dampak keberhasilan Programa Penyuluhan, Implementasi program melalui RKKP penyuluh Pertanian dan tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan di Kecamatan Cenrana, Bontoa dan Turikale Kabupaten Maros

3.5 Konsep operasional

a. Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah sistem pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pemberdayaan yang bertujuan agar para petani dan keluarganya mampu secara mandiri mengorganisasikan dirinya dan masyarakat untuk bisa hidup lebih sejahtera.

b. Programa penyuluhan

Programa penyuluhan pertanian merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

c. Penyuluh pertanian

Penyuluh pertanian adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikirnya melalui proses penyebaran informasi

d. Petani

Petani merupakan seseorang yang terlibat dalam bidang pertanian. Mereka memelihara tumbuhan dan hewan untuk dijadikan makanan atau bahan mentah.

e. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

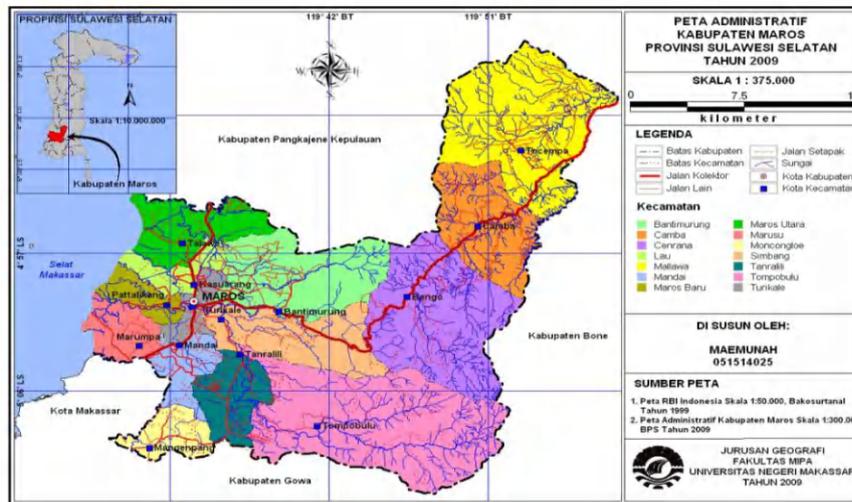
4.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Keadaan geografis adalah keadaan tentang permukaan bumi, iklim, flora dan fauna serta hasil-hasil yang dapat diperoleh dari bumi. Meskipun demikian dalam bagian ini penulis hanya akan menguraikan tentang letak dan luas wilayah serta keadaan alam dari lokasi penelitian. Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara $40^{\circ}45'$ - $50^{\circ}07'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}205'$ - $129^{\circ}12'$ Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Maros adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Maros $1.619,12 \text{ km}^2$ yang secara administrasi pemerintahannya terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan. Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Bupati, pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang membawahi Kepala Lurah dan Kepala Desa.



Gambar 2. Peta Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Lingkungan Dan Dusun Di Kabupaten Maros Tahun 2012

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun
1	Mandai	6	6	16
2	Moncongloe	5	0	17
3	Maros Baru	7	11	13
4	Marusu	7	0	22
5	Turikale	7	31	0
6	Lau	6	19	6
7	Bontoa	9	3	34
8	Bantimurung	8	4	32
9	Simbang	6	0	21
10	Tanralili	8	2	30
11	Tompobulu	8	0	35
12	Camba	8	6	22
13	Cenrana	7	0	33
14	Mallowa	11	3	32
Jumlah		103	85	313

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa kecamatan mallawa mempunyai desa/kelurahan yang terbanyak yaitu 11 desa/kelurahan dengan 85 lingkugan dan 32 dusun sedangkan kecamatan mongcongloe yang mempunyai jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit yaitu 5 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan keseluruhan di kabupaten Maros yakni 103 terbagi menjadi 85 lingkungan dan 313 dusun.

4.2 Keadaan Iklim dan Topografi

Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata Suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 26,8°C tiap bulannya. Kondisi rata-rata suhu bulanan paling rendah pada suhu 26,0°C (terjadi pada bulan Januari 2011) sedangkan paling tinggi pada suhu 27,9°C (terjadi pada bulan Oktober 2011). Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 331,9 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 183 hari selama Tahun 2011, dengan rata-rata suhu udara minimum 19,7°C dan rata-rata suhu udara maksimum 29,3°C.

Penyinaran matahari selama tahun 2011 rata-rata berkisar 67%. Secara geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/ bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran.

4.3 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal bagi suksesnya kegiatan pembangunan. Peranan yang dilakukan oleh penduduk dapat menentukan perkembangan pembangunan suatu daerah baik yang regional maupun internasional. Keadaan penduduk suatu daerah atau wilayah dapat ditinjau dari berbagai segi antara jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur

4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan juga sangat menentukan dalam klasifikasi pembagian kerja. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Maros menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Mandai	17.890	17.930	35.820
2.	Moncongloe	8.631	8.683	17.314
3.	Maros Baru	11.936	12.409	24.345
4.	Marusu	12.537	12.948	25.485
5.	Turikale	20.223	21.633	41.856
6.	Lau	11.978	12.485	24.463
7.	Bontoa	12.917	13.666	26.583
8.	Bantimurung	13.449	14.732	28.181
9.	Simbang	10.713	11.594	22.307
10.	Tanralili	12.384	12.211	24.595
11.	Tompobulu	6.994	7.220	14.214
12.	Camba	6.092	6.483	12.575
13.	Canrana	6.624	7.087	13.711
14.	Mallawa	5.175	5.588	10.763
Jumlah		157.543	164.669	322,212

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012.

Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maros adalah 322.212 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 157.543 jiwa dan penduduk perempuan 164.669 jiwa. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling banyak adalah kecamatan Turikale yaitu 41.856 jiwa dan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah kecamatan Mallawa yaitu 10.763 jiwa.

4.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Umur penduduk sangat mempengaruhi aktivitas seseorang dalam mengelola bidang usahanya. Penduduk yang usianya masih muda relatif memiliki kemampuan fisik yang kuat dan mudah menerima inovasi dibandingkan dengan penduduk yang usianya lebih tua, tetapi dari segi pengalaman, penduduk yang usianya lebih tua memiliki pengalaman dan kematangan berpikir yang lebih baik dari pada penduduk usia muda. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Maros menurut kelompok umur dapat dilihat pada :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Maros, 2012

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0-4	33.781	10,48%
2.	5-9	34.486	10,70%
3.	10-14	33.470	10,39%
4.	15-19	30.244	9,39%
5.	20-24	28.062	8,71%
6.	25-29	26.938	8,36%
7.	30-34	25.159	7,69%
8.	35-39	24.772	8,67%
9.	40-44	21.559	6,69%
10.	45-49	16.727	5,19%
11.	50-54	13.514	4,19%
12.	55-59	10.181	3,16%
13.	60-64	7.961	2,47%
14.	65+	15.358	4,77%
Jumlah		322.212	100,00

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012.

Berdasarkan tabel 3 terlihat sebagian besar penduduk di Kabupaten Maros berusia produktif. Jumlah penduduk yang berusia produktif yaitu pada usia 15-54 tahun adalah sebanyak 186.975 jiwa (58,03%), usia belum produktif yaitu pada usia 0-14 tahun sebanyak 101.737 jiwa (31,57%), serta penduduk usia non produktif yaitu pada usia di atas 55 tahun sebanyak 33.500 jiwa (10,40%).

4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

4.4.1 Sarana Pendidikan

Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar guna memenuhi kebutuhan bagi pembangunan daerah. Melalui pendidikan dalam arti luas (mencakup seluruh proses kehidupan manusia) diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas. Untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Lembaga pendidikan di Kabupaten Maros, 2012

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru/Dosen
1	Taman Kanak-Kanak	92	110
2	SD	255	1619
3	SMP	54	633
4	SMA	25	358
5	SMK	10	39
6	MA	19	360
7	Perguruan Tinggi	4	198
Jumlah		459	3317

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2012.

Pada tabel 4 diatas menunjukkan Lembaga pendidikan yang terdapat di Kabupaten Maros dapat dikatakan cukup memadai dalam mendukung upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Maros dirasa telah cukup untuk mengayomi masyarakatnya, jumlah total sarana pendidikan di kabupten Maros 459 unit.

4.4.2 Kesehatan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mutu penduduk (SDM) adalah kesehatan untuk itu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan adanya pelayanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Khusus di Kabupaten Maros ada beberapa sarana dan prasarana kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Maros, 2012.

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit	3
2	Puskesmas	63
3	Rumah Bersalin	2
4	Balai Pengobatan/Klinik	3
5	Posyandu	392
6	Poskesdes	58
7	Polindes	2
8	Apotek	20
9	Bidan Praktek	56
Jumlah		617

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012.

Pada tabel 5 diatas menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Maros berjumlah 617 unit. Jumlah Rumah sakit yang ada di Kabupaten Maros sebanyak 3 Unit yang terbagi menjadi Rumah Sakit

Umum milik Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Milik Swasta dan Rumah Sakit Khusus. Begitu pula halnya dengan Puskesmas yang terbagi menjadi 6 Puskesmas perawatan, 8 Puskesmas non keperawatan, 14 Puskesmas keliling dan 34 Puskesmas pembantu.

4.4.3 Perdagangan

Fasilitas perdagangan berupa pasar dan toko merupakan wadah dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan penunjang (sekunder) penduduk, juga sebagai tempat menjual hasil-hasil pertanian bagi petani. Jumlah pasar di Kabupaten Maros yang ada saat ini 22 yang tersebar disetiap kecamatan di Kabupaten Maros. Selain pasar sarana penunjang lain dalam kegiatan perdagangan yaitu berupa toko, Koperasi berguna sebagai tempat penyimpanan atau meminjam modal bagi petani, di Kabupaten Maros terdapat koperasi sebanyak 642 Unit Desa (KUD) yang berjumlah 152 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah Sarana Kegiatan Perdagangan/Perekonomian di Kabupaten Maros, 2012

No	Kecamatan	Pasar (Unit)	Koperasi (Unit)	KUD/Non KUD (Unit)
1	Mandai	1	24	37
2	Moncongloe	1	35	1
3	Maros Baru	2	42	15
4	Lau	2	38	12
5	Turikale	1	189	85
6	Marusu	1	64	18
7	Bontoa	2	52	8
8	Bantimurung	3	47	21
9	Simbang	2	26	6
10	Tanranlili	2	20	10
11	Tompobulu	1	30	9
12	Camba	1	21	8
13	Cenrana	1	28	6
14	Mallawa	2	26	5
Jumlah		22	642	152

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Pada tabel 6 menunjukkan jumlah pasar di kabupaten Maros berjumlah 22 unit, koperasi 642 unit dan KUD/non KUD berjumlah 152, kecamatan yang mempunyai pasar terbanyak yaitu Bantimurung dengan 3 unit, pasar ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat terutama bagi petani yang ingin memasarkan hasil-hasil usaha taninya, begitupun dengan koperasi di gunakan oleh petani sebagai tempat mengakses modal bagi usaha taninya.

4.5 Potensi Pertanian

4.5.1 Tanaman Pangan

Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Sulawesi Selatan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan.

Produksi padi Kabupaten Maros tahun 2011 sebesar 292.647,20 ton yang dipanen dari areal seluas 46.646 ha atau rata-rata 62,74 kuintal per hektar yang berarti naik sekitar 0,32% dibandingkan dengan tahun 2010, yang menghasilkan 293.775,00 ton padi dengan luas panen 47.006,00 ha.

Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Maros dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 99,68 persen dari seluruh produksi padi atau sebesar 291.723,20 ton. Sedangkan sisanya

dihasilkan oleh padi ladang 0,32%. Produksi Jagung Kabupaten Maros pada tahun 2011 sebesar 25.023,51 ton dengan luas panen 4.392 ha atau menghasilkan rata-rata 55,14kuintal/ha.

4.5.2 Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

Hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan di Kabupaten Maros pada tahun 2011 adalah tanaman kemiri yang memiliki produksi sebesar 3.985,40 ton. Sebagian besar hasil perkebunan tersebut dihasilkan oleh perkebunan rakyat.

Kawasan hutan di Kabupaten Maros pada tahun 2011 seluas 64.711 ha yang antara lain terdiri dari 14,526 ha hutan lindung, 28.570 ha Suaka Alam dan Pelestarian Alam, 15.068 ha hutan produksi terbatas, dan 6,547 ha hutan produksi tetap.

4.5.3 Peternakan dan Perikanan

Peranan sub sektor peternakan dalam bidang pertanian cukup besar menempati posisi kedua terbesar setelah tanaman bahan makanan. Salah satu tujuan di sub sektor ini adalah meningkatkan populasi dan produksi daging dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Hal yang pokok tentu saja adalah untuk menghasilkan pendapatan peternak terutama yang berdomisili di pedesaan.

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Maros berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2011 jumlah ternak sapi potong sebesar 59.471 ekor, kerbau 1.937 ekor, kuda 4.704 ekor, kambing 16.088 ekor dan babi 215 ekor. Sedangkan jumlah ternak unggas di

Kabupaten Maros 619.549 ayam kampung, 231.997 ayam petelur, 8.577.601 ayam pedaging, 262.655 itik dan 16.398 manila. Pada tahun 2011, total produksi ikan hasil pengangkapan dan budidaya sebesar 23.056,8 ton, dengan jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 7.868 rumah tangga

4.6 Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Cenrana

Secara geografis Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian (UPT-BPP) Kecamatan Cenrana terletak dibagian timur Kabupaten Maros dengan Batas-Batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Camba dan Kabupaten Pangkep.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Camba dan Kabupaten Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.

Kecamatan Cenrana berada pada ketinggian 340-700 m diatas permukaan laut. Keadaan Topografi bervariasi dari bentuk datar, berbukit sampai bergunung dengan presentase bentuk datar 51,62%, Berbukit, 11,45%, dan Bergunung 36,93 %. Wilayah Kerja UPT-BPP Kecamatan Cenrana memiliki jenis tanah Mediteran 50%, Aluvial 45%, dan Latosol 5% dengan rata-rata curah hujan setiap tahun selama sepuluh tahun terakhir 3.050 mm.

4.7 Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Turikale

Letak geografis wilayah Balai Penyuluhan Pertanian Turikale terletak dalam ibu kota Kabupaten Maros dengan luas wilayah 29,93 ha. Adapun jumlah Kelurahan dengan luas wilayah, sebagai berikut Kelurahan Pettuadae dengan luas wilayah 4,68 Km²; Kelurahan Adatongeng dengan luas wilayah 3,09 Km²; Kelurahan Raya dengan luas wilayah 2,06 Km²; Kelurahan Boribellaya dengan luas wilayah 8,6 Km²; Kelurahan Turikale dengan luas wilayah 2,71 Km²; Kelurahan Alliritengae dengan luas wilayah 1,73 Km²; Kelurahan Taroadada dengan luas wilayah 7,06 Km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandai
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Maros Baru.
- Sedangkan topografi wilayah bervariasi dari topografi landai bergelombang dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 0 - 5 meter.

Jenis tanah diwilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Turikale adalah tanah alluvial, mediteran dan podsolik merah kuning. Berdasarkan data curah hujan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan tipe iklim menurut Oldemain tergolong kategori beriklim tropis dengan curah hujan type C 2 (bulan basah 2 – 5 bulan dan bulan kering

2 – 3 bulan), Type C 3 (bulan basah 5 – 6 bulan dan bulan kering 3 - 5 bulan). Bulan basah umumnya jatuh pada bulan Nopember sampai dengan bulan April, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Mei sampai dengan Oktober, temperatur udara berkisar antara 20 – 30 derajat Celsius, terendah pada musim hujan dan tertinggi pada musim kemarau.

4.8 Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Bontoa

Secara geografis wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bontoa berada dibagian utara Kabupaten Maros dengan Batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Lau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lau dan Kecamatan Maros Baru
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah Kerja BPP Bontoa meliputi 1 (Satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Bontoa dengan luas ± 93,53 km² yang terdiri dari 9 (Sembilan) desa/ kelurahan yaitu Kelurahan Bontoa, Desa Tunikamaseang, Minasa Upa, Pajukukang, Bonto Bahari, Tupabbiring, Ampekale, Selenrang, dan Botolempangan.

Keadaan Topografi Kecamatan Bontoa umumnya dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-100 m dpl dengan panjang garis 8 Km. Karakteristik dan jenis tanah di Wilayah Kerja BPP Kecamatan

Bontoa terdiri atas jenis tanah aluvial, latosol, dan mediteran dengan tingkat keasaman tanah (pH) berkisar antara 4,5 - 7,5. Berdasarkan tipe iklim Kecamatan Bontoa memiliki tipe iklim C2 dengan curah hujan diatas 200 mm/bulan dengan bulan basah selama 5-6 bulan dan bulan kering dengan curah hujan 100 mm/bulan selama 2-4 bulan. Curah hujan tertinggi antara Desember sampai dengan maret dan curah hujan terendah terjadi selama bulan juli sampai dengan September setiap tahunnya.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya partisipatif aktif dari petani sebagai pelaku utama usaha tani yang mengetahui secara mendalam kondisi usahatani mereka masing-masing.

Faktor umur akan mempengaruhi aktifitas kerja petani dalam menjalankan usaha taninya. Petani yang memiliki umur relatif muda akan menunjukkan kerja yang lebih produktif, karena memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelolah usahatannya.

Menurut Soekartawi (1988), umur petani mempengaruhi kemampuan kerja fisik dan kematangan psikologisnya. Petani yang berumur muda mempunyai daya kerja fisik yang kuat namun jika tidak dibarengi dengan kematangan psikologis sering membuat keputusan gegabah yang kadang merugikan dirinya sendiri. Seperti mudahnya terpancing untuk menerapkan input pertanian jenis baru yang belum teruji kualitasnya pada skala luas. Tetapi kalau petani sudah tua juga cenderung kurang inovatif. Petani setengah baya cenderung yang paling tinggi adopsi inovasinya, karena kekuatan fisik dan kematangan psikologisnya saling mendukung. Berikut ini adalah sebaran responden berdasarkan umurnya (Soekartawi, 1988).

Umur dapat dapat mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, umur relatif muda memiliki kecenderungan kemampuan untuk mencari informasi dan menerima inovasi yang cepat berkaitan dengan aktivitas usahatani untuk lebih berkembang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur responden di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel 25 berikut:

Tabel 7 . Jumlah Responden Berdasarkan Umur Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan 2013

No	Umur Responden (Thn)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	28 - ≤ 35	4	4,1
2	≥ 36 - ≤ 44	32	32,5
3	≥ 45 - ≤ 53	43	43,9
4	≥ 54 - ≤ 62	18	18,4
5	≥ 63	1	1,1
Total		98	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat tani di Kabupaten Maros yang mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh di setiap kecamatan yang memiliki jumlah paling tinggi yakni kelompok umur yang berkisar antara 45 sampai 53 tahun sebanyak 43 orang atau 43,9 % sedangkan untuk kelompok yang paling rendah adalah kelompok umur 63 tahun ke atas dengan persentase 1,1 %.

5.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan usahatani dalam arti luas. Pendidikan merupakan pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal.

Pendidikan dan pengetahuan bagi petani yang tinggi, akan membangun cakrawaladan pola pikirdan sistim bertani yang lebih baik. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting bagi petani dalam melakukan usahatani. Pendidikan dapat berpengaruh langsung dalam mengadopsi teknologi-teknologi terapan yang berkembang dalam usaha tani. Walaupun pendidikan petani tidak sepenuhnya dari pendidikan formal melaikan lebih banyak diperoleh dari eksperimen atau pengalaman.

Pendidikan dan pengalaman pada umumnya mempengaruhi cara berfikir dan perilaku individu dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan banyaknya pengalaman individu maupun masyarakat akan lebih dinamis dan inovatif. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan informal maupun nonformal. Melalui pendidikan kualitas hidup seseorang dapat di ringkatkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk meningkatkan tingkat intelektual, maka pendidikan sangat dibutuhkan. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan di kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel 27 berikut:

Tabel 8. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD/Sedearajat	30	30,6
2	SMP/Sederajat	31	31,6
3	SMA/ Sederajat	31	31,6
4	PerguruangTinggi	6	6,1
Total		98	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Berdasarkan pada tingkat pendidikan masyarakat tani di kabupaten maros yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan di setiap kecamatan yang memiliki jumlah paling tinggi yakni tingkat pendidikan SMA dan SMP dengan jumlah responden mencapai 31 orang atau 31,6 % dan jumlah yang paling rendah adalah tingkat Perguruan tinggi yang hanya berjumlah 6 orang dengan persentase 6,1 %

5.2 Potensi dan keadaan Wilayah Penelitian

5.2.1 Kecamatan Bontoa

Kecamatan Bontoa merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Maros dimana terdapat 9 desa/kelurahan dengan luas sekitar 93,53 km. Keadaan topografi kecamatan bontoa ini umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-100 m dpl. Adapun karakteristik dan jenis tanah di kecamatan tersebut yakni jenis tanah alluvial, latosol dan mediterian dengan tingkat keasaman tanah berkisar antara 4,5 sampai 7,5.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencariannya di kecamatan Bontoa yakni sebagai berikut:

Tabel . 9 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencariannya kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No	Dusun/Desa	Petani	Petambak	Peternak	Nelayan
1	Bontoa	496	203	157	11
2	Tupabbiring	97	198	309	130
3	Pajukukang	89	451	136	181
4	Ampekale	128	282	128	83
5	Bonto Bahari	106	181	114	109
6	Tunikamaseang	359	245	199	45
7	Minasa Upa	171	287	203	92
8	Bontolempangan	339	257	191	12
9	Salenrang	629	644	275	47
Jumlah		2414	2748	1712	710

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di kecamatan Bontoa yang bermata pencarian sebagai petambak berjumlah 2748 orang, kemudian petani memiliki jumlah 2414 dan peternak berjumlah 1712 sedangkan yang bermata pencarian sebagai nelayan jumlahnya sebanyak 710 orang. Dapat disimpulkan bahwa mata pencarian sebagai petambak merupakan mata pencarian utama di kecamatan bontoa.

Keadaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Luas lahan Pertanian dan Kehutanan diwilayah kerja UPT-BPP Kecamatan Bontoa adalah sebagai berikut:

Tabel . 10 Pemanfaatan Lahan Pertanian Kecamatan Bontoa, 2012

No	Bentuk Penggunaan Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah:	
	- Irigasi Teknis	264,50
	- Pengairan ½ Teknis	-
	- Irigasi Desa	150,00
	- Tadah Hujan	1520,00
2	Lahan Kering:	
	- Pekarangan dan Pemukiman	294,53
	- Tegalan/ Kebun	20,26
3	Perairan:	
	- Tambak	2540,99
	- Kolam	-
4	Hutan:	
	- Hutan Produksi	11,30
	- Hutan Bakau	36,00
	- Bambu	12,50
5	Lain-lain	4454,89
	Jumlah	9353,00

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa total luas penggunaan lahan di Kecamatan Bontoa 9353,00 ha dengan luas lahan sawah yang terdiri atas lahan sawah teknis 264,50 ha; Irigasi desa 150 ha; tadah hujan 1520 ha; Lahan kering yang terdiri atas pekarangan 294,53 ha dan tegalan 20,26 ha; tambak 2540,99; hutan produksi 11,30 ha; hutan bakau 36,00 ha; dan hutan bambu 12,50 ha.

Adapun potensi sumberdaya perikanan di kecamatan bontoa kabupaten Maros yakni sebagai berikut :

Tabel . 11 Potensi Sumberdaya Perikanan Bontoa Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No	Desa	Jumlah RTP		Luas lahan tambak	Luas kolam (Ha)	Luas Mina padi (Ha)	KJA (unit)
		Tambak	Nelayan				
1	Bontoa	171	11	152,33	-	-	-
2.	Tupabbiring	198	128	214,89	-	-	-
3	Pajukukang	454	179	503,13	-	-	-
4	Ampekale	468	80	314,63	-	-	-
5	Botobahari	122	107	578,10	-	-	-
6	Tunikamaseang	419	43	247,25	-	-	-
7	Minasa Upa	430	91	167,21	-	-	-
8	Botolempangan	337	8	166,24	-	-	-
9	Salenrang	352	42	197,21	-	-	-

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan pda tabel diatas mengenai potensi sumberdaya perikanan di kecamatan Bontoa Desa Botobahari merupakan desa dengan luas lahan tambak mencapai 578,10 Ha, untuk Desa Pajukukang dengan luas lahan tambak mencapai 503,13 Ha sedangkan Desa bontoa merupakan desa dengan luas lahan tambak terkecil mencapai 152,33 Ha.

Tabel . 12 Potensi Sumberdaya Peternakan kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No	Desa	RTP	Jumah ternak besar			Jumlah ternak kecil	Jumlah ternak unggas (ekor)			
			Sapi	kerbau	kuda	kambing	Ayam buras	Ayam Ras Potong Petelur		Itik
1	Bontoa	534	106	24	8	65	5105	-	-	4573
2	Tupabbiring	296	22	-	-	115	4413	5000	-	2617
3	Pajukukang	342	14	-	2	135	4836	-	-	4658
4	Ampekale	311	115	-	-	101	4567	-	-	3574
5	Bontobahari	108	-	4	-	42	2423	-	-	2478
6	Tunikamaseang	483	27	29	8	119	5082	-	-	4573
7	Minasa Upa	387	8	8	-	91	5786	-	-	4106
8	Botolempangan	323	135	16	11	28	5007	-	-	2463
9	Salenrang	544	116	28	6	46	4357	-	5000	4312
Jumlah		3338	543	125	35	742	41576	5000	5000	33313

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Bersadarkan pada tabel diatas jumlah ternak yang paling banyak di usahakan di kecamatan Bontoa adalah ternak unggas terutama ternak ayam buras yang mecapai 41.576 ekor dan untuk ternak besarnya jumlah yang paling banyak yakni ternak sapi dengan jumlah 543 ekor.

Bersdasarkan pada potensi-potensi yang di miliki di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros baik dari segi bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Dapat disimpulkan bahwa bidang perikanan merupakan sektor pendapatan utama di kecamatan Bontoa. Namun, banyak masalah-masalah yang dihadapi di bidang tersebut hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh :

“ Kecamatan Bontoa merupakan kecamatan yang sumber penghasilan masyarakatnya datang dari bidang perikanan (tambak dan nelayan) namun banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat mulai dari produksi dan produktifitas tambak tergolong

*rendah berkisar 200-250 kg/Ha, mengenai kesuburan tanah dll. Bukannya hanya bidang perikanan masalah tersebut juga terjadi pada pertanian, dan peternakan“
wawancara dengan bapak Seahuddin, SP*

Analisis program penyuluhan Kecamatan Bontoa hal yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan dikecamatan tersebut adalah peningkatan produksi dan produktifitas baik itu tambak (udang dan bandeng), padi, dan unggas (ayam buras, ayam ras dan itik). Sehingga pendapatan petani-nelayan meningkat dan mengubah tarap hidup petani-nelayan menjadi sejahtera. Selain itu, program kecamatan bontoa juga menekankan pada pengembangan peningkatan kapasitas SDM petani-nelayan dan pengembangan pertanian organik. Dengan demikian, bahwa program penyuluhan yang ada di kecamatan Bontoa dapat digolongkan sesuai dengan potensi wilayah yang ada di kecamatan tersebut.

Hal ini sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), maka program penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansi terkait.

5.1.2 Kecamatan Cenrana

Kecamatan Cenrana Merupakan kecamatan yang salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros yang terletak dibagian timur kabupaten tersebut. Dengan ketinggian berkisar mulai dari 340 – 710 di atas permukaan laut. Adapun keadaan topografi bervariasi dari bentuk datar, berbukit sampai bergunung dengan persentase rata-rata yakni: datar dengan persentase 51,62% , Berbukit 11,45% dan bergunung 36,93 %.

Kedadaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Luas lahan Pertanian dan Kehutanan diwilayah kerja UPT-BPP Kecamatan Cenrana adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Pemanfaatan Lahan Pertanian Kecamatan Cenrana, 2012

No	Bentuk Penggunaan Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	
	- Pengairan ½ Teknis	736,00
	- Pengairan Desa	499,00
	- Tadah Hujan	766,00
2	Lahan Kering	
	- Tegalan	1.553,00
	- Pekarangan	238,00
3	Hutan Rakyat/ Kayu-kayuan	4.280,00
4	Perkebunan Rakyat	2.330,00
5	Lain-Lain	25,00
Total		10.216

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa total luas penggunaan lahan di kecamatan cenrana 10.216 ha dengan luas lahan sawah yang terdiri atas lahan sawah setengah teknis 736,00 ha; Pengairan desa 499,00 ha; Tadah Hujan 766,00. Lahan kering yang terdiri atas Tegalan seluas 1.553,00 ha; Pekarangan 238,00 ha. Hutan rakyat/ Kayu-kayuan 4280,00ha; Perkebunan Rakyat 2.330 ha dan penggunaan lahan lainnya 25,00 ha.

Adapun penggunaan lahan pertanian dan kehutanan diwilayah kerja UPT-BPP kecamatan Cenrana menurut penggunaan lahannya yakni sebagai berikut :

Tabel . 14 Penggunaan lahan Pertanian Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No	Desa	Luas tanaman / Panen	Hasil	Produksi	Ket
1	Labuaja	69	6,590	455	Gabah Kering Panen
2	Lebbo tangae	320	6,590	2109	
3	Laiya	840	6,590	5586	
4	Limpoccoe	383	6,590	2532	
5	Rompegading	332	6,590	2085	
6	Baji Pa' mai	233	6,590	1535	
7	Cenrana Baru	466	6,590	3080	
Jumlah		2643	6,590	17382	

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan pada tabel mengai penggunaan lahan pertanian di kecamatan Cenrana mengemukakan bahwa kelurahan laiya memiliki luas tanam/ panen yang paling luas yang mencapai 840 Ha dengan jumlah produksi gabah keringnya dapat mencapai 5586 Ton, sedangkan untuk kelurahan yang paling rendah penggunaan lahannya adalah kelurahan labuaja dengan jumlah produksi gabah kering hanya mencapai 455 ton.

Tabel . 15 Jumlah Ternak dan Unggas Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012

No	Jenis ternak	Jumlah	Produksi
1	Sapi	3393	36000
2	Kerbau	321	3500
3	Kuda	311	600
4	Kambing	205	150
5	Ayam Buras	20029	15600
6	Ayam Ras	3000	24000
7	Itik	1715	400
8	Ayam Petelur	48000	108000

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan pada tabel 15 mengenai jumlah ternak di kecamatan Cenrana mengemukakan bahwa jumlah ternak yang dikembangkan masyarakat di kecamatan Cenrana yang paling banyak yakni jenis ternak sapi yang jumlahnya mencapai 3393 ekor dengan tingkat produksinya mencapai 36000. Sedangkan untuk jenis unggas yang ada di kecamatan Cenrana yang paling banyak di kembangkan oleh masyarakat di Kecamatan Cenrana adalah unggas jenis ayam buras yang jumlahnya mencapai 20029 Ekor dengan produksi dapat mencapai 15.600.

Tabel .16 Luas dan Produksi tanaman Perkebunan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No	Jenis tanaman	Luas	Produksi (Kw)
1	Kopi	75	4,00
2	Cengkeh	1	1,10
3	Lada	1	0,70
4	Coklat	32	13,50
5	Kelapa	45	35,00
6	Jambu Mente	135	70,00
7	Kemiri	13	10,00
8	Kapuk	5	0,10

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan pada tabel 16 mengai penggunaan lahan untuk tanam perkebunan di kecamatan Cenrana mengemukakan bahwa tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat di kecamatan

tersebut adalah jenis tanaman jambu mente dengan luas lahan 135 Ha dengan tingkat produksinya mencapai 70,00 Kw. Sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan cengkeh dan lada yang paling sedikit diusahakan dengan luas tanam kedua komoditi tersebut hanya mencapai 1 Ha.

Pada tabel diatas dapat dilihat berbagai macam potensi wilayah di Kecamatan Cenrana mulai dari sektor pertanian, peternakan dan kehutanan dan perkebunan masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi di kecamatan tersebut :

1. Sektor pertanian :

- a. Penggunaan benih bermutu/berlabel baru mencapai 33,33%
- b. Pemupukan berimbang baru mencapai 33,33 %
- c. Pelaksanaan PHT baru mencapai 33,33%

Besadarkan pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat mengakibatkan jumlah produktifitas padi yakni baru mencapai 65,56 Kw perhektar

2. Sektor Peternakan :

- a. Pelaksanaan vaksinasi secara teratur baru mencapai 16,66%
- b. Perkandangan baru mencapai 16,66%
- c. Pemberian pakan baru mencapai 33,33%

3. Sektor Kehutanan dan perkebunan :

- a. pelaksanaan PHT baru mencapai 16,66%
- b. pemahaman petani tentang agroforesty baru mencapai 16,66%

c. penanganan lahan kering dengan sistem konversi baru mencapai 33,33%

4. Pengembangan sumber daya manusia :

Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap baru mencapai 33,33 % mengetahui tentang :

a. Manajemen agribisnis

b. Subsistem pengelolaan

c. Pembuatan rencana kerja dengan metode partisipatif baru mencapai 33,33%

d. Pencarian informasi teknologi baru mencapai 33,33 %

Berdasarkan pada masalah yang ada di kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang terdapat pada berbagai bidang yakni bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan dan perkebunan maka penyuluh di kecamatan tersebut membuat program kerja untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga produktifitas meningkat dan menyejahterakan masyarakat. Program kerja tersebut tercantum dalam tujuan program kecamatan Cenrana yakni sebagai berikut :

1. Peningkat penggunaan benih berlabel / bermutu
2. Penggunaan pemupukan berimbang sesuai dengan kondisi lahan (sfesifikasi lokasi)
3. perbaikan sistem tanaman dengan sistem legowo dan pola SRI
4. Pengendalian hama/penyakit dengan sistem PHT
5. Penggunaan pupuk organik

6. Pengaturan pola tanam
7. Perbaikan sistem peternakan dari cara tradisional menjadi peternakan yang berorientasi agribisnis
8. Penyediaan bibit unggul yang mempunyai produktifitas yang tinggi
9. Pembuatan kandang
10. Pemberian makanan tambahan
11. Pengendalian penyakit dengan jalan vaksinasi secara teratur
12. Pemanfaatan mesin tetas untuk mempercepat penambahan populasi
13. Pengembangan luas areal dan pemeliharaan tanaman kehutanan dan perkebunan di luar kawasan hutan
14. Pengelolaan lahan kering dengan sistin konservasi dan agroforestry
15. Pengendalian hama dan penyakit dengan konsep PHT
16. Pemupukan beimbang sesuai dengan kondisi lahan
17. Perbaikan pasca panen

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai di kecamatan Cenrana maka dapat di golongan bahwa programa yang dibuat oleh penyuluh yang di UPT-BPP kecamatan Cenrana sesuai dengan masalah yang ada di kecamatan tersebut.

5.1.3 Kecamatan Turikale

Keadaan Lahan Pertanian.

Berdasarkan potensi lahan pertanian di Balai Penyuluhan pertanian Turikale tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel . 17 Luas Tanam, Panen dan Produktifitas kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No.	Desa/Kelurahan	Luas tanam (Ha)	Produktifitas (Ton)
1.	Turikale	83,01	4,3
2.	Adatongeng	75,38	3,7
3.	Taroadada	125,53	3,8
4.	Raya	99,00	5,2
5.	Pettuadae	121,12	4,2
6.	Boribellaya	379,41	5,2
	Jumlah	883,45	26,4

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan Pada tabel mengenai jumlah luas tanam, Panen serta produktifitas di kecamatan Turikale dapat dilihat bahwa kelurahan Boribellaya memiliki jumlah luas tanam paling tinggi dengan tingkat produktifitasnya perhektar mencapai 5,2 Ton/ Ha.

Keadaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Luas lahan Pertanian dan Kehutanan diwilayah kerja UPT-BPP Kecamatan Turikale adalah sebagai berikut:

Tabel. 18. Pemanfaatan Lahan Pertanian Kecamatan Turikale, 2012

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Lahan (Ha)			
		Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Tadah hujan (Ha)	Tambak/ Kolam	Lainnya
1	Turikale	83,01	-	1,50	-
2	Adatongeng	-	75,35	-	29,81
3	Taroad	-	125,35	-	59,83
4	Raya	99,00	-	1,25	-
5	Pettuadae	-	82,35	1,75	-
6	Boribellaya	283,36	96,06	0,75	-
7	Alliritengae	-	-	-	-
	Jumlah	465,47	379,28	6,37	89,64

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2012

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah luas sawah irigasi Kecamatan Turikale 465,47 ha; Sawah Tadah Hujan 379,28 ha; Tambak/Kolam 6,37 ha dan lainnya 89,64 jadi total penggunaan lahan di Kecamatan Turikale adalah 940,76 ha.

Luas lahan menurut penggunaannya Bidang Pertanian

Tabel .19 Keadaan Luas tanam padi/ produksi Di Kecamatan Turikale , Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan 2012 .

No.	Desa/Kelurahan	Luas tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Turikale	83,01	4,3
2.	Adatongeng	75,38	3,7
3.	Taroad	125,53	3,8
4.	Raya	99,00	5,2
5.	Pettuadae	121,12	4,2
6.	Boribellaya	379,41	5,2
	Jumlah	883,45	26,4

Sumber Kabupaten Maros dalam angka 2012.

Pada tabel yang memuat tentang keadaan luas tanam padi dan tingkat produktifitasnya dapat dilihat bahwa di kecamatan turikale pada kelurahan Taroad memiliki jumlah luas lahan yang paling tinggi dibandingkan kelurahan yang ada di dikecamatan turikale, namum jika

dilihat mengenai produktifitasnya kelurahan Raya memiliki produktifitas yang paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan yang lain.

Tabel 20. Keadaan Luas Tanam Kacang Ijo/produksi. Di kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.

No.	Desa/Kelurahan	Luas tanam (Ha)	Produksi(Ton)
1.	Turikale	11,50	9,67
2.	Adatongeng	1,50	8,90
3.	Taroad	1,20	9,50
4.	Raya	15,26	9,60
5.	Pettuadae	15,20	9,80
6.	Boribellaya	105	1,300
	J u m l a h	149,66	48,77 KG

Sumber Kabupaten Maros dalam angka 2012.

Bersadarkan pada tabel mengenai keadaan luas tanam kacang hijau di kecamatan Turikale dapat dilihat bahwa kelurahan yang ada di kecamatan turikale yang paling luas area tanamnya adalah kelurahan boribellaya yang mencapai 105 Ha dengan tingkat produktifitasnya dapat mencapai 1.300 kg.

Tabel 21. Keadaan Luas Tanam Jagung / produksi di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012

No.	Desa/Kelurahan	Luas tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Turikale	-	-
2.	Adatongeng	1,50	5,50
3.	Taroad	3,70	6,50
4.	Raya	1,50	6,70
5.	Pettuadae	2,40	7,50
6.	Boribellaya	5	6,80
	J u m l a h	14,2	33,00

Sumber Kabupaten Maros dalam angka 2012

Bersadarkan pada tabel mengenai keadaan luas tanam jagung hijau di kecamatan Turikale dapat dilihat bahwa kelurahan yang ada di kecamatan turikale yang paling luas area tanamnya adalah kelurahan

boribellaya yang mencapai 5 Ha dengan tingkat produktifitasnya dapat mencapai 6,80 /Ha. Namun, jika dilihat mengenai tingkat produktifitasnya perhektar kelurahan Pettuadea yang memiliki tingkat produktifitas yang paling tinggi yakni 7,50 /ha dibandingkan dengan kelurahan yang ada di kecamatan Turikale.

Tabel. 22 Keadaan Luas tanam Ubi kayu/ produksi di kecamatan Turikale, kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi selatan, 2012.

No.	Desa/Kelurahan	Luas tanam (Ha)	Produktifitas (Ha)
1.	Turikale	-	-
2.	Adatongeng	1,50	7,60
3.	Taroadada	2,30	7,60
4.	Raya	-	-
5.	Pettuadae	1,75	6,81
6.	Boribellaya	2,00	6,50
7.	Alliritengae.	-	-
	J u m l a h	7,55	28,51

Sumber Kabupaten Maros dalam angka 2012.

Bersadarkan pada tabel mengenai keadaan luas tanam Ubi kayu di kecamatan Turikale dapat dilihat bahwa kelurahan yang ada di kecamatan turikale yang paling luas area tanamnya adalah kelurahan taroadada yang mencapai 2,30 Ha dengan tingkat produktifitasnya dapat mencapai 7,60/ Ha.

Luas lahan menurut penggunaannya Bidang Perikanan

Tabel. 23 luas Lahan Menurut Penggunaannya pada bidang perikanan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012

No	Desa/Kelurahan	Tambak/Bandeng			Kolam		
		Luas tebar (Ha)	Luas panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas tebar (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Turikale	-	-	-	1,12	1,2	0,641
2.	Adatongeng	29,81	29,50	6,30	-	-	-
3.	Taroadaa	59,83	59,30	6,50	-	-	-
4.	Raya	-	-	-	1,75	1,75	0,532
5.	Pettuadae	-	-	-	1,25	1,25	0,564
6.	Boribellaya	-	-	-	0,75	0,75	0,621
7.	Alliritengae	-	-	-	1,12	1,12	0,531
	J u m l a h	89,64	89,64	12,80	5,99	5,99	2,889

Sumber Kabupaten Maros dalam angka 2012.

Berdasarkan pada tabel mengenai keadaan luas penggunaan lahan untuk bidang perikanan di kecamatan Turikale dapat dilihat bahwa kelurahan yang ada di kecamatan turikale yang paling luas area tambaknya adalah kelurahan taroadaa yang mencapai 59,83 Ha dengan tingkat produktifitasnya dapat mencapai 6,50 kg. Sedangkan untuk penggunaan kolam kelurahan yang paling luas penggunaannya adalah kelurahan Raya dengan produktifitas dapat mencapai 0,532/ Ha.

Bidang Peternakan

Tabel . 24 luas Lahan Menurut Penggunaanya pada bidang Peternakan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2012

No	Desa/Kelurahan	Ternak besar/unggas						
		Sapi	Kambing	Kuda	Kerbau	Ayam buras	Ayam ras	Itik
1	Turikale	15	10	-	-	1.200	1.000	200
2	Adatongeng	10	25	4	5	1.410	-	883
3	Taroadada	27	8	5	-	-	1.500	500
4	Raya	42	29	-	22	4.000	3.530	620
5	Pettuadae	31	15	-	-	4.500	1.200	150
6	Boribellaya	28	25	4	6	3.500	1.500	300
7	Alliritengae	-	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	153	112	13	33	14.610	8.730	2.653

Sumber Kabupaten Maros dalam angka 2012.

Bersadarkan pada tabel mengenai keadaan untuk bidang peternakan di kecamatan Turikale dapat dilihat bahwa kelurahan raya memiliki jumlah ternak sapi yang paling banyak yakni 42 ekor, ternak kambing yang paling banyak yakni raya sebanyak 29 ekor, kuda sebanyak 22 ekor. Sedangkan untuk jenis unggas kelurahan pettuade memiliki jumlah yang paling banyak untuk jenis ayam buras yang mencapai 4.500 ekor sedangkan untuk jenis ayam ras kelurahan raya yang mencapai 3.530 ekor, sedangkan untuk jenis itik kelurahan adatongeng mencapai 883 ekor.

Berikut ini adalah tabel rangkaian yang tercanum dalam program penyuluhan di kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yakni sebagai berikut:

No	Keadaan	Masalah	Tujuan
1	Pola SRI	Petani belum bisa menggunakan sistem tanam SRI	Tanam Sistem SRI
2	Anjuran mengenai pola tanam legowo baru mencapai 10 %	Kurangnya minat serta keterampilan	Meningkatnya penggunaan pola tanaman legowo mencapai 50 %
3	Proses pembuatan kompos, pupuk organik ditingkat petani masih rendah	Keterampilan petani masih rendah, manfaat pupuk organik belum dimengerti.	Agar supaya proses pembuatan pupuk organik lebih diwujudkan
4	Anjuran penggunaan varietas: Label biru baru mencapai 55% petani menggunakan	Minat petani masih rendah, campuran bibit daya tumbuh kurang.	Agar supaya penggunaan varietas label biru bias mencapai 70%.
5	Pemupukan pada tanaman baru mencapai 30%	Ketersediaan pupuk pada saat diperlukan	Agar supaya pemupukan tepat dan dosis
6	Pemeliharaan ayam buras ditingkat petani masih tradisional.	Informasi tentang pemeliharaan ayam buras masih kurang	Agar supaya petani mau melaksanakan pemeliharaan ayam buras sesuai anjuran
7	Rendahnya pengetahuan kelompok tentang administrasi	Keterampilan penyusunan rencana masih rendah	Meningkatkan Pembinaan kelompok tani
8	Kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit mencapai 30 %	Keterampilan petani dalam penanggulangan hama dan penyakit masih rendah	Meningkatnya produksi panen padi
9	Rendahnya pengetahuan petani mengenai pembuatan administrasi kelompok	Keterampilan penyusunan rencana masih rendah	Mengembangkan Pembinaan kelompok tani
10	Tingkat kehilangan pasca panen mencapai 30 %	Rendahnya Produktifitas petani	Meningkatnya produktifitas petani

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyuluh lapangan dikecamatan turikale mengatakan bahwa keadaan yang terjadi di wilayah kerja penyuluh pertanian di kecamatan turikale di akibatkan beberapa faktor yakni :

1. Tingkat pendidikan masyarakat tani masih tergolong rendah
2. Tingkat partisipasi petani juga masih rendah, apalagi kelompok tani yang dekat dengan perkotaan
3. Umur petani
4. SDM

5.2 Implementasi Program Penyuluhan Oleh Penyuluh Lapangan Di Kabupaten Maros

Programa penyuluhan kecamatan yang telah disahkan merupakan pedoman utama bagi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di lapangan . sesuai dengan UU SP3K pasal 23 yaitu untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Dalam penyusunan dan melaksanakan rencana kerja tahunan, maka penyuluh harus berpedoman pada programa penyuluhan tersebut yang dilaksanakan secara partisipatif menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dalam Memahami keterkaitan antara programa penyuluhan bisa dilihat pada tujuan yang ingin dicapai dalam setiap rencana kegiatan penyuluhan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Maros tersebut ada beberapa pola yang hampir sama dalam programa penyuluhan yang dibuat tiap kecamatan.

Pola tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis tujuan yakni:

- a. Agribisnis dan Pasar
- b. Hama dan penyakit tanaman dan ternak
- c. Ketahanan Pangan
 - a. Konversi lahan dan hutan
 - b. Pengelolaan panen dan pengelolaan hasil
 - c. Pengembangan Pertanian Organik
 - d. Pemanfaat lembaga/ kelompok tani
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas
 - f. Irigasi dan pengairan

5.2.1 Kecamatan Bontoa

Tabel 25. Tingkat Implementasi Program Penyuluhan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Pelaksanaan Kegiatan	Sebaran Jawaban Petani			Skor Ideal	Capaian (%)	Ket
		1	2	3			
					90		
1	Agribisnis Dan Pasar	0	10	20	80	88,9	Tinggi
2	Hama dan Penyakit	0	2	28	88	97,8	Tinggi
3	Ketahanan Pangan	7	18	5	58	64,4	Tinggi
4	Konversi lahan dan hutan	15	15	0	45	50	Sedang
5	Pengelolaan panen dan pengelolaan hasil	0	3	27	87	96,7	Tinggi
6	Pengembangan pertanian organik	0	9	21	81	88,9	Tinggi
7	Maanfaat lembaga/ kelompok tani	15	15	0	45	50	Sedang
8	Peningkatan produksi dan produktivitas	0	12	18	78	86,7	Tinggi
9	Irigasi dan pengairan	30	0	0	30	30,0	Rendah
Tingkat Pelaksanaan						72,6	Tinggi

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Berdasarkan pada tabel 25 dapat dikatakan bahwa implemetasi programa yang di susun oleh penyuluh di kecamatan Bontoa kabupaten maros secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dapat di golongan tinggi dengan persentase 72,6 %.

Jika melihat beberapa pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tergolong tinggi dengan persentase 61 - 90 %. Kegiatan tersebut diantaranya : Agribisnis dan pasar, pemberantasan hama dan penyakit, ketahanan pangan, pengelolaan panen dan pasca panen, pengembangan pertanian organik, dan peningkatan produksi dan produktivitas.

Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikategorikan sedang yakni dengan pesentase 31 - 60 % diantaranya adalah kegiatan konversi lahan dan hutan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai irigasi dan pengairan dengan pencapaian 30,0 %. hal tersebut terjadi karena sistem penanaman padi masyarakat di kecamatan bontoa menggunakan sistem tadah hujan dan mayoritas masyarakatnya berpropesi di bidang perikanan (tambak dan nelayan).

5.2.2 Kecamatan Cenrana

Tabel 26. Tingkat Implementasi Programa Penyuluhan Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.

No	Pelaksanaan Kegiatan	Sebaran Jawaban Petani			Skor Ideal	Capaian (%)	Ket
		1	2	3			
					114		
1	Agribisnis Dan Pasar	0	26	12	88	77,2	Tinggi
2	Hama dan Penyakit	0	4	32	104	91,2	Tinggi
3	Ketahanan Pangan	21	16	1	46	40,4	Sedang
4	Konversi lahan dan hutan	15	22	1	40	35,1	Rendah
5	Pengelolaan panen dan pengelolaan hasil	0	5	33	109	95,6	Tinggi
6	Pengembangan pertanian organik	0	3	35	111	97,4	Tinggi
7	Maanfaat lembaga/ kelompok tani	20	18	0	56	49,1	Sedang
8	Peningkatan produksi dan produktivita	0	3	35	109	95,6	Tinggi
9	Irigasi dan pengairan	21	17	0	55	48,2	Sedang
Tingkat Pelaksanaan						70,0	Sedang

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa implementasi programa oleh penyuluh di kecamatan cenrana dapat di golongkan sedang dengan persentase 70 %. Berdasarkan pada beberapa pelaksanaannya ada beberapa kegiatan penyuluhan yang implemetasinya tergolong tinggi dengan persentase antara 77 sampai 97,4 % yakni pada kegiatan agribisnis dan pasar, hama dan penyakit, pengeloaan panendan hasil, pengembangan pertanian organik dan peningkatan produksi dan produktivitas.

Sedangkan untuk bebera kegiatan penyuluhan yang masuk dalam kategori sedang dengan pesentase 39 – 76 % yakni kegiatan ketahanan pangan, manfaat lembaga/ Kelompok tani serta irigasi dan pengairan.

5.2.3 Kecamatan Turikale

Tabel 27. Tingkat Implementasi Programa Penyuluhan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Pelaksanaan Kegiatan	Sebaran Jawaban Petani			Skor Ideal	Capaian (%)	Ket
		1	2	3			
					90		
1	Agribisnis Dan Pasar	9	21	0	51	56,7	Sedang
2	Hama dan Penyakit	0	14	16	76	84,4	Tinggi
3	Ketahanan Pangan	16	14	0	44	48,9	Sedang
4	Konversi lahan dan hutan	4	13	13	69	76,7	Tinggi
5	Pengelolaan panen dan pengelolaan hasil	0	12	18	78	86,7	Tinggi
6	Pengembangan pertanian organik	0	14	16	76	84,4	Tinggi
7	Maanfaat lembaga/ kelompok tani	15	15	0	45	50,0	Sedang
8	Peningkatan produksi dan produktivitas	0	8	22	82	91,1	Tinggi
9	Irigasi dan pengairan	14	16	0	46	51,1	Sedang
Tingkat Pelaksanaan						69,7	Sedang

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Berdasarkan pada tabel pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam peograma penyuluhan pertanian yang ada di kecamatan Turikale menunjukkan bahwa pelaksaan kegiatan penyuluhan dapat dikategorikan pada tingkat sedang dengan persentase 69,7 %. Untuk beberapa pelaksanaan kegiatan yang ada di programa penyuluhan yang di buat oleh penyuluh di kecamatan Turikale yang tergolong kategori tinggi yakni dengan persentase 61 – 90 % diantaranya adalah kegiatan pemberantasan hama dan penyakit, konversi lahan dan hutan, pengelolaan panen dan hasil, pengembangan pertanian organik dan peningkatan produksi dan produktivitas

Sedangkan untuk beberapa implementasi kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan kecamatan Turikale masuk dalam kategori sedang dengan persentase berkisar antara 31 - 60 %.yakni kegiatan agribisnis dan pasar, ketahanan pangan, manfaat lembaga/ kelompok tani serta irigasi dan pengairan.

Berdasarkan pada 3 kecamatan yang menjadi sampel di kabupaten Maros yakni kecamatan Bontoa, kecamatan Cenrana dan kecamatan Turikale tingkat implemetasi kegiatan penyuluhan masuk dalam ketegori tinggi. Jika di lihat pada setiap kecamatan yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwan tingkat implemetasi yang paling tinggi diantara 3 kecamatan tersebut adalah kecamatan Cenrana mencapai 72,6 %, sedangkan yang paling rendah kecamatan Turikale dengan tingkat kategori sedang yakni 69,7 %

Jika melihat beberapa kegiatan pelaksanaan penyuluhan di ketiga kecamatan yang ada di kabupaten Maros terdapat beberapa kesamaan kegiatan yang dikategorikan tinggi yakni peningkatan produksi dan produktivitas , pengembangan pertanian organik, pengeloan hasil dan pasca panen serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman dan ternak. Hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat tani di yang berujung pada meningkatnya tarap kesejahteraan hidup manyarakat di kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

5.3 Tingkat Partisipasi Petani dalam Kegiatan Penyuluhan

5.3.1 Tingkat Partisipasi dalam Kegiatan Penyuluhan

Sejak tahun 1976 penyuluhan pertanian menggunakan pendekatan latihan dan kunjungan (LAKU), ternyata sangat efektif dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani sehingga pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras. Dalam revitalisasi penyuluhan pertanian dipandang perlu sistem kerja LAKU diterapkan kembali dengan modifikasi sesuai kondisi dan kebijaksanaan yang ada.

LAKU singkatan dari latihan dan kunjungan. Latihan/pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator ke penyuluh pertanian melalui metode partisipatif. Sedangkan kunjungan adalah kegiatan penyuluh pertanian ke kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten Maros menggunakan sistem LAKU (Latihan dan Kujungan), dimana untuk 1 bulan BPP kabupaten Maros melakukan 2 kali pelatihan/pertemuan disetiap BPP dan 2 kali kujungan langsung ke lokasi.

1. Kecamatan Bontoa

Tabel 28. Tingkat Partisipasi Petani Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Interval	Jumlah Responden	Persentase
1	5 - ≤ 9	11	36,7
2	≥ 10 - ≤ 14	19	63,3
3	≥ 15	0	0
Total		30	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Pada tabel 28. Mengenai tingkat partisipasi kelompok tani di kecamatan Bontoa yang terdiri dari 30 jumlah responden dapat dilihat bahwa pada interval kedua dengan jumlah pertemuan 10 sampai 14 kali memiliki jumlah persentase sebanyak 63,3 % dengan jumlah responden sebanyak 19 petani. Sedangkan pada interval ke tiga dengan 15 kali pertemuan jumlah respondennya tidak ada (0) dengan persentase 0%. Pada interval 1 dengan jumlah pertemuan 5 sampai 9 kali terdapat 11 responden dengan persentase 36,7 %.

2. Kecamatan Cenrana

Tabel 29. Tingkat Partisipasi Petani Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Interval	Jumlah Responden	Persentase
1	5 - ≤ 9	8	21,05
2	≥ 10 - ≤ 14	29	76,31
3	≥ 15	1	2,64
Total		38	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Pada tabel 29. Untuk kecamatan Cenrana dengan jumlah responden mencapai 38 orang petani pada yang paling banyak tingkat partisipasi petani dengan jumlah 29 orang petani dengan jumlah persentase 76, 31 terdapat pada interval ke-2. Sedangkan untuk yang paling rendah tingkat partisipasinya dengan hanya berjumlah 1 orang dengan jumlah pertemuan dalam kegiatan penyuluhan 15 kali dengan persentase 2,62 %. Dan untuk interval pertama dengan jumlah responden 8 orang dengan yang mengikuti kegiatan penyuluhan sebanyak 5 sampai 9 kali dengan persentase 21,05 %.

3. Kecamatan Turikale

Tabel 30. Tingkat Partisipasi Petani Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Interval	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	5 - ≤ 9	13	43,3
2	≥ 10 - ≤ 14	17	56,7
3	≥ 15	0	0
Total		30	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Pada tabel 30. Untuk kecamatan Turikale tingkat partisipasi kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan yang yang paling dominan yakni dengan jumlah pertemuan 10 sampai 14 kali pertemuan dengan jumlah responden mencapai 17 orang dengan persentase 56,7 %. Sedangkan yang paling rendah yakni dengan jumlah pertemuan 15 kali dalam 1 tahun dengan persentase 0 %.

Berdasarkan pada data yang yang didapat dari responden di tiga kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan dari ketiga kecamatan tersebut dimana jumlah responden yang paling banyak di ikuti oleh petani adalah interval 10 sampai 14 kali pertemuan dengan pesentase paling tinggi. Namun pada ketiga kematan tersebut kecamatan bontoa paling banyak respondennya yang paling sedikit mengikuti kegiatan partisipasi dengan jumlah responden 13 orang, rendahnya tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan di Kecamatan Turikale disebabkan kebanyakan petani yang bermukim di dekat daerah perkotaan yang lebih memilih melakukan kegiatan yag lebih menghasilkan di bandikan mengikuti kegiatan penyuluhan.

5.3.2. Tingkat Frekuensi Petani Memberikan Saran dan Tanggapan dalam Kegiatan Penyuluhan

Tingkat partisipasi Petani (anggota kelompok tani) dalam memberikan saran dan tanggapan dalam kegiatan Penyuluhan di kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Kecamatan Bontoa

Tabel 31. Frekuensi Petani Dalam Memberikan Saran Dan Tanggapan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.

No	Interval	Jumlah Responden	Persentase
1	2 - ≤ 6,33	13	43,3
2	> 6,33 - ≤ 10,66	17	56,7
3	> 10,66	0	0
Total		30	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Pada tabel 31. Diatas dapat dilihat bahwa jumlah petani yang mengajukan pertanyaan atau saran dengan frekuensi 2 sampai 6 kali dengan jumlah responden mencapai 13 orang dengan persentase 43,3%. Sedangkan untuk yan mengajukan tanggapannya dengan jumlah rata-rata 6 sampai 10 kali mencapai 17 petani dengan persentase 56,7 %.

2. Kecamatan Cenrana

Tabel 32. Frekuensi Petani Dalam Memberikan Saran Dan Tanggapan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No	Interval	Jumlah Responden	Persentase
1	2 - ≤ 6,33	16	42,2
2	> 6,33 - ≤ 10,66	21	55,2
3	> 10,66	1	2,6
Total		38	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Tabel 32. Menunjukkan bahwa jumlah yang mengajukan tanggapa paling banyak yakni dengan interval 6 sampai 10 kali dengan jumlah responden mencapai 21 responden, sedangkan yang paling sedikit responden yang mengajukan pertanyaan dan pernyataan yang hasnya berjumlah 1 orang dengan persentase hanya 2,6 %.

3. Kecamatan Turikale

Tabel 33. Frekuensi Petani Dalam Memberikan Saran Dan Tanggapan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.

No	Interval	Jumlah Responden	Persentase
1	2 - ≤ 6,33	17	56,7
2	> 6,33 - ≤ 10,66	13	43,3
3	> 10,66	0	0
Total		30	100

Sumber : Data primer setelah diolah 2013

Berdasarkan pada tabel 33. Jumlah responden yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan dalam kegiatan penyuluhan paling tinggi adalah kategori pertama dengan jumlah responden mencapai 17 orang atau 56,7 ,04 % dan yang paling rendah terdapat pada ketegori ke tiga dengan jumlah reponden 0 atau 0 %

Dari ketiga kecamatan yang menjadi sampel di Kabupaten Maros jika dibandingkan dapat dilihat bahwa kecamatan Turikale memiliki jumlah responden yang paling sedikit memberikan saran dan tanggapan dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPP Kecamatan Turikale dengan jumlah petani mencapai 17 orang halini sebanding dengan tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan. Hal tersebut di benarkan oleh salah satu penyuluh lapangan

yang bekerja di BPP Turikale beliau mengutarakan bahwa” Kebanyakan Petani yang menjadi bimbingan setiap penyuluh apalagi yang bermukim didekat daerah perkotaan sangat sulit untuk didatangkan dalam kegiatan penyuluhan para petani lebih mengutamakan pekerjaan yang menghasilkan dari pada mengikuti materi dari penyuluh.

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah diuraikan, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Programa penyuluhan yang dibuat oleh penyuluh dari ketiga kecamatan yang menjadi sampel di kabupaten Maros sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah di setiap kecamatan di kabupaten maros, karena dalam kerangka program kerja yang ada dalam programa penyuluhan semuanya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki setiap kecamatan yang ada di kabupaten Maros.
2. Implementasi programa penyuluhan yang dilakukan oleh anggota BPP di kabupaten Maros yang di jadikan sampel dapat dikatakan sesuai dengan yang tercantum dalam programa penyuluhan dapat dilihat dari tingkat implementasi programa penyuluhan di setiap kecamatan itu dimasukan dalam kategori sedang sampai tinggi
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dari ketiga kecamatan di Maros dapat dilihat bahwa kecamatan Turikale memiliki Tingkat partisipasi yang paling rendah dengan jumlah responden 13, hal ini sejalan dengan tingkat petani yang mengajukan tanggapan dan pertanyaan dalam kegiatan Penyuluhan yang sangat sedikit yakni dengan 2 sampai 6 kali dengan jumlah responden mencapai 17 orang.

6.2. Saran

1. BPP lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kegiatan penyuluhan khususnya masyarakat tani yang bermukim di dekat daerah perkotaan.
2. Meningkatkan pembinaan kompetensi dan profesional penyuluh.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pertanian, peneliti, perguruan tinggi dan seluruh stakeholder pertanian untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Anonim, 2011. *Programa Penyuluhan Di era Revitalisasi*. <http://www.pelitakarawang.com/2010/10/programa-penyuluhan-pertanian-di-era.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2011. Makassar.
- Anonim, 2011. *Perencanaan Program Kerja Penyuluhan*. <http://beef.blogspot.com/2011/10/perencanaan-program-penyuluhan.html>. Diakses Pada tanggal 18 Oktober 2011. Makassar.
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta
- Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mardikanto, T. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Paulian. 1987. *Vadecum Bimas Volume IV*. Sekretariat Badan Pengendalian Bimas. Jakarta.
- Samsudin S, U.1994. *Manajemen Penyuluhan Pertanian*. Bina Cipta. Bandung.
- Slamet, Margono. 2001. *Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah*. Bogor. IPB.
- Slamet M 1985, *Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Interaksi Tahun 1 No. 1:3-7
- Sito, Jakes. 2011. *Programa Penyuluhan Pertanian*. <http://penyuluhthl.wordpress.com/2011/12/13/contoh-programa-penyuluh-pertanian/> Diakses Pada tanggal 19 Oktober 2011. Makassar.
- Soekartawi. 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suparta, N. DKK, *Penyuluhan Peternakan*, Universitas Udayana, Denpasar 2002

Theodorson, G.A. 1969. Modern Dictionary Of Sociology. In Dusoldorp.
1987. P.33

1	Amal Faisal	2	3	1	2	3	3	1	3	2	40	SMA
2	Hamzah Talib	2	3	2	1	3	3	1	3	1	36	SMA
3	Muh. Basri	3	3	2	2	3	3	1	3	2	49	SMA
4	Bundu	2	3	1	2	3	3	1	3	1	38	SMA
5	Anwar	3	3	3	3	3	3	1	3	2	41	SMP
6	M. Arafah N	3	3	2	2	3	3	2	3	2	43	SMA
7	Tajuddin	3	3	2	2	3	3	2	3	2	36	SMU
8	M. Amin	3	3	1	2	3	3	2	3	1	39	SMK
9	Baharuddin	2	3	1	2	3	3	1	3	1	43	SD
10	M. Arafah	2	3	1	2	3	3	1	3	1	42	SMP
11	Akbar	2	3	2	2	3	3	1	3	1	43	SMP
12	Wahyudi	2	3	1	2	3	3	1	3	2	41	SMA
13	Rustam	2	3	2	1	3	3	1	3	2	40	SMP
14	Efendi	2	3	2	1	3	3	2	3	1	39	SMA
15	Muh. Ramli	2	3	2	2	3	3	2	3	1	45	SMP
16	Aminuddin	3	3	1	2	3	3	2	3	2	50	SMA
17	Musliadi	3	3	1	1	3	3	1	3	2	45	SMP
18	Kamaruddin	2	3	1	1	3	3	1	3	1	49	SMA
19	Pallawagau	2	3	1	1	2	3	1	3	1	52	SD
20	Mustari	2	3	2	2	3	3	2	3	1	43	SD
21	Daling	2	3	2	2	3	3	2	3	1	48	SMP
22	Tola	2	3	2	1	3	3	1	3	1	54	SD
23	Abidin	3	3	1	2	3	3	2	3	2	45	SMA
24	Abd. Wahab	2	3	1	1	3	3	1	3	2	44	SMA
25	P. Limpo	2	3	1	1	3	3	2	3	1	56	SD
26	Saenal	2	3	2	2	3	3	2	3	2	39	SMP
27	Tajuddin	2	3	1	2	3	3	2	3	2	45	SMA
28	Muing	2	3	1	1	3	3	1	3	2	42	SMP
29	Manggazali	2	3	1	1	3	3	2	3	1	54	SMP
30	Ambo Messe	2	2	1	1	2	3	1	3	1	55	SD
31	Dg. Rapi	2	2	1	1	2	3	1	3	1	53	SD
31	Subair	3	3	2	2	3	3	2	3	2	43	SMP
33	Sattar	3	3	2	2	3	3	2	3	1	42	SMP
34	M. Akib	3	3	2	2	3	3	2	3	2	44	SMA
35	Rapi	3	2	1	2	2	2	1	3	1	48	SMP
36	Hamla	2	3	1	1	3	3	2	2	1	50	SMA
37	Ambotang	2	2	2	1	3	2	2	2	2	56	SMP
38	Muhammad	2	3	1	2	2	2	1	2	1	43	SMA

Kecamatan Cenrana

1	Syarifuddin	2	3	2	3	3	3	2	3	2	45	SMA
2	Anwar	2	3	2	3	3	3	2	3	2	30	SD
3	Agus	2	3	1	3	3	3	1	3	1	30	SMP
4	Abdul rahman C	2	3	1	2	3	2	1	3	2	59	SMA
5	Sulaiman	2	2	1	2	2	2	1	3	2	61	SD
6	Abdul Hamid B	2	2	1	1	2	2	1	2	1	63	SMP
7	Rahmat	1	2	1	1	2	2	1	3	2	43	SD
8	M. Basri	2	2	1	1	2	3	1	3	1	47	SMA
9	Amir	2	3	1	1	2	3	2	3	2	45	SMP
10	M. Nur	2	3	2	3	3	3	2	3	2	43	SMA
11	Baharuddin	2	2	2	3	3	2	1	3	1	47	SMP
12	M. Yasir Syah. SE	1	3	2	3	3	3	2	3	2	45	S1
13	H. Paharuddin Tola	2	3	1	2	3	2	1	2	1	54	SD
14	Santari	2	3	2	2	3	3	1	3	1	48	SD
15	Suhardi, SP	1	2	2	3	3	2	2	3	2	43	S1
16	Hapsari	1	2	1	2	2	3	2	3	2	49	SMA
17	Sabolla	2	2	1	3	2	3	2	2	2	53	SD
18	Abdul Aziz	2	2	2	2	2	2	1	2	1	47	SMA
19	H. Nurdin	2	3	1	3	3	2	2	2	2	55	SMP
20	Umar Juddin	2	3	2	3	2	3	2	3	1	46	SMP
21	Ambo Tuwo	1	2	1	2	3	2	1	3	1	56	SD
22	Dg. Duppa	1	3	2	2	3	3	1	3	1	55	SD
23	H. Muh. Ramli	2	2	2	2	2	3	2	3	1	43	SMA
24	Ambo Sakka	2	3	1	2	3	3	1	3	2	50	SMP
25	Abdul Rauf	1	3	1	3	3	2	2	2	2	52	SMP
26	Sinala	2	2	2	3	3	2	2	3	2	49	SMP
27	Hamdhana	2	3	2	2	3	3	2	3	1	44	SMA
28	H. lallo	1	2	1	2	2	2	1	2	1	57	SD
29	Sastriandi	2	3	2	3	2	3	2	3	2	46	SMA
30	H. Pacong	1	2	1	2	2	2	1	2	1	54	SD

Kecamatan Turikale

1	Zainal	3	3	2	2	3	3	2	3	1	46	S1
2	Muh Bahri	3	3	2	1	3	3	2	3	1	42	SMA
3	H. Kadir	3	3	2	2	3	3	2	3	1	45	SMA
4	M. Idris	3	3	2	2	3	3	1	3	1	43	D3
5	Lukman	3	3	2	1	3	3	1	3	1	28	SMA
6	Jumaing	3	3	2	2	3	3	2	3	1	35	SD
7	H. Alwi	3	3	2	2	3	3	2	3	1	49	SMP
8	Abdul Rahman	3	3	3	1	3	3	1	3	1	39	SMP
9	Khaeruddin	3	3	1	1	3	3	2	3	1	53	SD
10	M. Darwis	3	3	3	2	3	3	2	3	1	52	SD
11	H. Latief	3	3	2	2	3	3	2	3	1	48	SMP
12	Umar	3	3	3	2	3	3	2	3	1	49	SD
13	Syamsuddin	3	3	2	2	3	3	2	3	1	45	SMA
14	M. Rusli	3	3	2	2	3	3	1	3	1	52	SD
15	Dg. Taba	2	3	1	1	3	2	1	2	1	55	SD
16	M. Siden	3	3	2	1	3	3	1	3	1	49	SMP
17	Bustam	2	3	2	2	3	3	1	2	1	46	SMA
18	Dg. Tarru	2	3	1	1	3	2	1	2	1	52	SD
19	Baharuddin	3	3	3	2	3	2	2	3	1	44	SMA
20	H. lewa	2	3	2	1	3	2	1	2	1	57	SD
21	H. Ambo Upa	3	3	1	1	3	3	2	2	1	56	SD
22	Lewanuddin	2	3	2	2	3	3	2	2	1	50	SMP
23	Anwar	3	3	3	2	3	2	2	3	1	47	SMP
24	Ahmad. S	2	3	2	1	3	2	1	3	1	42	SMP
25	H. Maing	3	3	2	1	3	2	1	2	1	54	SD
26	H. Makku	2	3	2	1	3	3	1	2	1	52	SD
27	H. Abdulla	2	3	1	1	2	2	1	2	1	50	SMP
28	M. rizal	3	3	2	2	3	3	2	2	1	42	SMA
29	H. Nusu	2	2	1	1	2	3	1	2	1	53	SD
30	H. Hamide	2	2	1	1	2	2	1	2	1	56	SD

Kecamatan Bontoa

Kecamatan Bontoa

No	Nama Responden	Jmlah Pertemuan/Thn	Jmlh Kehadiran	Jmlah Tanggapan/saran
1	Zainal	16	14	10
2	Muh Bahri	16	12	9
3	H. Kadir	16	14	10
4	M. Idris	16	13	8
5	Lukman	16	12	8
6	Jumaing	16	11	7
7	H. Alwi	16	12	8
8	Abdul Rahman	16	10	6
9	Khaeruddin	16	9	5
10	M. Darwis	16	10	5
11	H. Latief	16	9	8
12	Umar	16	8	7
13	Syamsuddin	16	11	9
14	M. Rusli	16	13	10
15	Dg. Taba	16	14	10
16	M. Siden	16	10	5
17	Bustam	16	9	5
18	Dg. Tarru	16	12	8
19	Baharuddin	16	7	4
20	H. lewa	16	8	4
21	H. Ambo Upa	16	9	4
22	Lewanuddin	16	13	9
23	Anwar	16	9	5
24	Ahmad. S	16	8	4
25	H. Maing	16	5	2
26	H. Makku	16	10	6
27	H. Abdulla	16	11	9
28	M. rizal	16	14	10
29	H. Nusu	16	8	4
30	H. Hamide	16	10	7

Kecamatan Cenrana

NO	Nama	Jumlah Pertemuan /tahun	Jumlah Kehadiran	Jumlah Tanggapan dan saran
1	Amal Faisal	16	12	8
2	Hamzah Talib	16	14	9
3	Muh. Basri	16	13	9
4	Bundu	16	14	8
5	Anwar	16	14	9
6	M. Arafah N	16	13	8
7	Tajuddin	16	13	7
8	M. Amin	16	12	6
9	Baharuddin	16	10	5
10	M. Arafah	16	14	10
11	Akbar	16	12	7
12	Wahyudi	16	10	5
13	Rustam	16	9	4
14	Efendi	16	10	6
15	Muh. Ramli	16	14	9
16	Aminuddin	16	12	8
17	Musliadi	16	14	9
18	Kamaruddin	16	11	6
19	Pallawagau	16	9	4
20	Mustari	16	8	3
21	Daling	16	10	5
22	Tola	16	14	12
23	Abidin	16	12	8
24	Abd. Wahab	16	15	10
25	P . Limpo	16	9	7
26	Saenal	16	11	4
27	Tajuddin	16	9	5
28	Muing	16	10	7
29	Manggazali	16	9	5
30	Ambo Messe	16	8	3
31	Dg. Rapi	16	14	7
32	Subair	16	13	8
33	Sattar	16	14	8
34	M. Akib	16	13	6
35	Rapi	16	13	5
36	Hamla	16	8	3
37	Ambotang	16	10	9
38	Muhammad	16	12	7

Kecamatan Turikale

No	Nama	Jumlah Pertemuan /tahun	Jumlah kehadiran	Jumlah yang Mengajukan tanggapan dan saran
1	Syarifuddin	16	14	10
2	Anwar	16	13	8
3	Agus	16	13	9
4	Abdul rahman C	16	12	7
5	Sulaiman	16	10	6
6	Abdul Hamid B	16	9	5
7	Rahmat	16	9	4
8	M. Basri	16	8	4
9	Amir	16	8	3
10	M. Nur	16	12	8
11	Baharuddin	16	10	5
12	M. Yasir Syah. SE	16	14	8
13	H. Paharuddin Tola	16	9	6
14	Santari	16	8	5
15	Suhardi, SP	16	13	10
16	Hapsari	16	10	4
17	Sabolla	16	11	8
18	Abdul Aziz	16	13	9
19	H. Nurdin	16	9	6
20	Umar Juddin	16	6	4
21	Ambo Tuwo	16	10	7
22	Dg. Duppa	16	8	6
23	H. Muh. Ramli	16	9	4
24	Ambo Sakka	16	12	7
25	Abdul Rauf	16	13	8
26	Sinala	16	11	6
27	Hamdhana	16	12	8
28	H. lallo	16	6	2
29	Sastriandi	16	7	2
30	H. Pacong	16	9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Pemanfaatan kolam ikan air tawar yg masih rendah	Pengembangan ikan air tawar agar lebih luas	Waktu dan cara pengeloannya masih tradisional	Kelompok tani / taruna tani	Penebaran bibit ikan tawar	Cara dan waktu penebaran	Tatap muka anjang sana kunjungan	4 kelurahan	4 kelompok tani	Maret / April 2012	Swadaya	TIM BPP	BPP / KP Kab.Maros

Disahkan Oleh :

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros.

KTNA Kecamatan Turikale

Kepala UPT/Koordinator
Penyuluh Pertanian
BPP Kec. Turikale

IR. HBUDIMAN EFENDY.MP

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19551119 197603 1 003

MUH.YASIR SYAF,SE

NURDIN.S.TP

Nip.19631231 198802 1 012